



Katalog: 9301005

PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA MENURUT PENGELUARAN

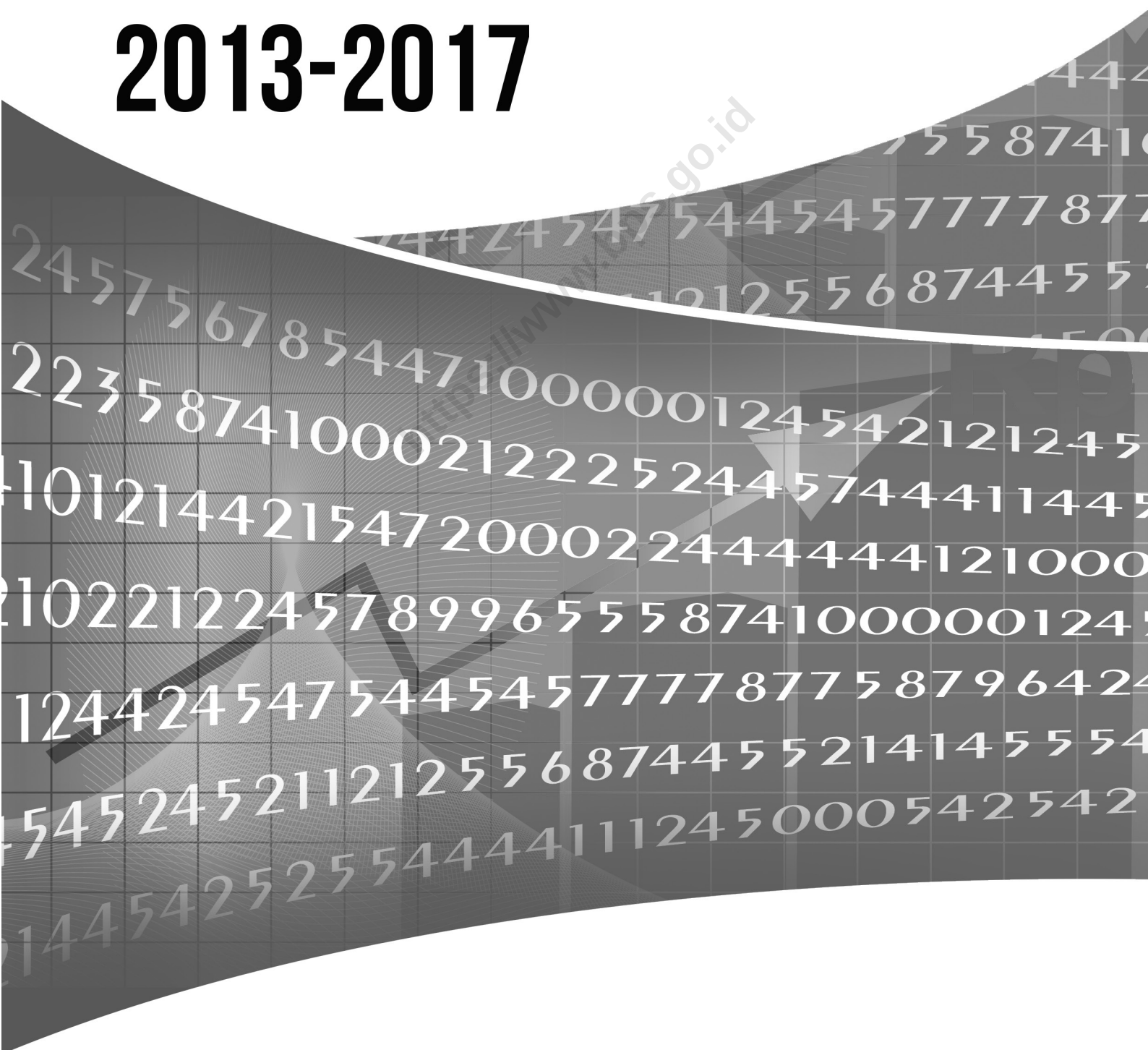
2013-2017



BADAN PUSAT STATISTIK

PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA MENURUT PENGELUARAN

2013-2017



PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA MENURUT PENGELUARAN 2013-2017

Gross Domestic Product of Indonesia by Expenditure 2013-2017

ISSN : 2580-1708

No Publikasi/Publication Number : 07240.1801

Katalog/Catalog : 9301005

Ukuran Buku/Book Size : 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman/Total of Pages : xii+117 halaman/pages

Naskah/Manuscript :

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran

Sub-directorate of Expenditure Accounts Consolidation

Penyunting/Editor :

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran

Sub-directorate of Expenditure Accounts Consolidation

Desain Kover oleh/cover designed by :

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Sub-directorate of Statistic Compilation and Publication

Diterbitkan oleh/Published by:

© **Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia**

Dicetak oleh/Printed by :

Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah. Namun, perangkat data ini juga dapat digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, bahkan digunakan sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat peredaran uang, penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dsb.

Sampai saat ini, penghitungan PDB Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu dari sisi lapangan usaha (*industry*) dan sisi pengeluaran (*expenditure*), baik untuk periode tahunan maupun triwulanan. Pendekatan pertama menjelaskan agregat PDB yang terkait dengan penciptaan nilai tambah, yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha atau industri. Sebagian besar nilai tambah merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat, baik dalam bentuk upah dan gaji, pendapatan kapital, serta pendapatan atas pemilikan faktor produksi lain. Pendekatan kedua menjelaskan pengeluaran pendapatan baik untuk aktivitas konsumsi akhir dan investasi riil.

Publikasi “Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran” menyajikan data dan informasi tentang pendekatan PDB dari sisi pengeluaran untuk periode tahun 2013-2017, yang didasarkan atas dasar harga (adh) Berlaku maupun adh Konstan 2010.

Kami mengucapkan banyak terima kasih pada berbagai pihak yang telah mendukung penerbitan publikasi ini, semoga banyak memberikan manfaat bagi para pengguna. Saran dan kritik sangat diharapkan agar publikasi ini dapat disajikan dengan lebih baik di masa yang akan datang.

Jakarta, Mei 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

REPUBLIK INDONESIA


Dr. SUHARIYANTO

DAFTAR ISI/CONTENTS

	Halaman/ pages
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	iii
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	v
Daftar Tabel/ <i>List of Tables</i>	vii
Daftar Grafik/ <i>Charts List</i>	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
 BAB II TINJAUAN AGREGAT PDB INDONESIA MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017.....	 7
 BAB III PERKEMBANGAN RINCIAN KOMPONEN-KOMPONEN PDB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017.....	 15
3.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	15
3.2 Konsumsi Akhir LNPRT	19
3.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	20
3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	26
3.5 Perubahan Inventori	30
3.6 Ekspor Barang dan Jasa	31
3.7 Impor Barang dan Jasa	34
 BAB IV BEBERAPA AGREGAT PDB DAN PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA TAHUN 2013-2017	 39
4.1 PDB (Nominal)	39
4.2 Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel	41
4.3 Kecenderungan Rata-rata untuk Mengkonsumsi dan Menabung/ <i>Average Propensity to Consume & Average Propensity to Save</i>	47
4.4 Perbandingan Pengeluaran PDB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa	48

4.5	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	49
4.6	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDB	50
4.7	Perbandingan Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB	51
4.8	Perbandingan PDB terhadap Impor Barang dan Jasa	52
4.9	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	53
4.10	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	54
4.11	Rasio Perdagangan International (RPI)	56
4.12	Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri	57
4.13	Rasio Pendapatan Nasional (PN) terhadap PDB	58
4.14	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	60
BAB V	SUMBER DATA DAN METODE PENGHITUNGAN	63
5.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)	65
5.2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT)	69
5.3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)	78
5.4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	82
5.5	Perubahan Inventori (PI)	87
5.6	Ekspor/Impor Barang dan Jasa	95
5.7	Konsumsi Barang Modal Tetap	98
5.8	Pajak Tidak Langsung (Netto)	99
5.9	Pendapatan atas Faktor Produksi dari Luar Negeri	99
5.10	Transfer Berjalan (<i>Current Transfer</i>)	101
BAB VI	PENUTUP	103
	DAFTAR ISTILAH PENTING/ <i>GLOSSARIES</i>	105
	DAFTAR PUSTAKA/ <i>BIBLIOGRAPHY</i>	109
	LAMPIRAN/ <i>APPENDICES</i>	111

DAFTAR TABEL/LIST OF TABLES

	Halaman/ <i>pages</i>
Tabel 1. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013-2017	7
Tabel 2. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013-2017	9
Tabel 3. Distribusi Setiap Komponen Pengeluaran terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (persen)	11
Tabel 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013-2017 (persen)	12
Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013-2017 (persen)	13
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2013-2017.....	17
Tabel 7. Struktur dan Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2013-2017.....	19
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRRT Tahun 2013-2017	22
Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2013-2017	24

Tabel 10.	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Indonesia Tahun 2013-2017	27
Tabel 11.	Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Indonesia Tahun 2013-2017	30
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2013-2017 ...	33
Tabel 13.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2013-2017.....	35
Tabel 14.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Tahun 2013-2017.....	38
Tabel 15.	Produk Domestik Bruto dan PDB Perkapita Tahun 2013-2017	40
Tabel 16.	PDB, Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Nasional Per Kapita Tahun 2013-2017.....	45
Tabel 17.	<i>Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save</i> Tahun 2013-2017.....	48
Tabel 18.	Perbandingan PDB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2013-2017	49
Tabel 19.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013-2017	50
Tabel 20.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDB Tahun 2013-2017	51
Tabel 21.	Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB ADHB Tahun 2013-2017	52
Tabel 22.	Rasio PDB terhadap Impor Barang dan Jasa Tahun 2013-2017	53

Tabel 23.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Tahun 2013-2017	53
Tabel 24.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2013-2017	55
Tabel 25.	Rasio Perdagangan Internasional Tahun 2013-2017	56
Tabel 26.	Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri Tahun 2013-2017	58
Tabel 27.	Proporsi Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Terhadap PDB Tahun 2013-2017	59
Tabel 28.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Tahun 2013-2017	58

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK/CHARTS LIST

	Halaman
Grafik 1. Produk Domestik Bruto Indonesia adh Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran (triliun rupiah) dan Estimasi Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (juta jiwa) Tahun 2013-2017	8
Grafik 2. Produk Domestik Bruto Indonesia adh Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (triliun rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (persen) Tahun 2013-2017	9
Grafik 3. Perbandingan Produk Domestik Bruto Indonesia adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (triliun rupiah)	10
Grafik 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013-2017 (persen)	13
Grafik 5. Indeks Implisit Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013-2017	14

<https://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran dan PDB menurut lapangan usaha (industri) merupakan tampilan data ekonomi makro utama di samping bentuk tampilan lain seperti Tabel Input-Output (I-O), Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan Neraca Arus Dana (NAD). Sebagai ukuran dasar (*basic measure*) atas penggunaan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan melalui proses produksi, PDB menurut pengeluaran tampil saling melengkapi dengan PDB menurut lapangan usaha. Dalam konteks tersebut, ukuran PDB menurut pengeluaran menggambarkan aktivitas konsumsi, investasi dan eksternal yang berlangsung di dalam batas teritori suatu wilayah ekonomi. Berbagai variabel yang dapat ditemui dalam PDB menurut pengeluaran di antaranya adalah permintaan konsumsi akhir, pembentukan modal tetap atau investasi fisik, ekspor dan impor. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut ditujukan untuk memenuhi permintaan akhir berbagai pelaku atau sektor ekonomi domestik maupun luar negeri.

Penghitungan PDB melalui pendekatan pengeluaran, merupakan hal yang tidak terpisahkan dari penghitungan PDB melalui pendekatan lapangan usaha yang ditampilkan dalam suatu kerangka kerja data ekonomi. Meskipun demikian, penghitungan PDB menurut pengeluaran dilakukan secara independen dengan menggunakan data dasar yang berbeda. PDB menurut lapangan usaha lebih menjelaskan tentang proses produksi, serta pendapatan faktor yang berhasil diciptakan (balas jasa faktor produksi)¹ dari hasil produksi tersebut. Sedangkan PDB menurut pengeluaran menjelaskan tentang pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi

1 Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

tersebut. Selain itu, melalui komponen pengeluaran atau permintaan akhir (*final demand*) atau disebut sebagai PDB menurut pengeluaran, juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa dari domestik maupun impor (*supply side*). Melalui hubungan ini akan lebih mudah terlihat titik keseimbangan makro antara sisi “penyediaan dan permintaan”.

Secara konsep² dijelaskan bahwa, penghitungan PDB dari sisi yang berbeda dimaksudkan untuk : i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat perkiraan atau estimasi; ii) dapat memberi manfaat lebih dalam melakukan analisis PDB; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Meskipun secara teoritis kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*), tetapi karena perbedaan dalam pendekatan estimasi, sumber data maupun metoda pengukuran, terjadinya selisih atau diskrepansi statistik merupakan hal yang wajar.

Dengan demikian maka PDB menurut pengeluaran (*expenditure*) menjelaskan tentang besaran nilai produk atau barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat. Secara spesifik yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan produk dalam bentuk barang atau jasa yang tujuannya untuk dikonsumsi habis (atau tidak untuk diproses lebih lanjut), yang direalisasikan dalam bentuk pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta ekspor barang dan jasa.

2 Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

Di sisi lain, dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir domestik tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari negara lain (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya terkandung produk impor, sehingga untuk mengukur besaran nilai tambah domestik (PDB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari hasil penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan yang tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, menjadi peluang masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa perdagangan produk impor terus berkembang dari waktu ke waktu, baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDB menurut lapangan usaha (Y) punya total nilai yang sama besar dengan PDB menurut pengeluaran (E), namun di dalam kenyataan tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antara keduanya juga berbeda. Dalam penyajiannya, perbedaan tersebut diletakkan pada sisi PDB menurut pengeluaran, yang kemudian disebut sebagai perbedaan statistik (*statistical discrepancy*). Unsur yang menyebabkan terjadi perbedaan di antaranya adalah basis dan konsep pengukuran, metoda pendekatan, cakupan ukuran, serta sumber data yang digunakan. Adanya perbedaan tersebut diharapkan tidak menjadi masalah bagi para pengguna data PDB.

Penghitungan PDB dari sisi **pengeluaran**, dimaksudkan juga untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui berbagai ragam proses produksi (atau lapangan usaha) menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang pada gilirannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir. Atau pada sisi yang berbeda, PDB

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga-lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”

menurut pengeluaran juga menjelaskan tentang penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai **“output akhir (final output)”**. Hubungan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran untuk pembelian berbagai barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor (termasuk diekspor) merupakan bentuk analisis sederhana atas PDB, ditinjau dari dua pendekatan tersebut. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDB (lapangan usaha)
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi Akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan bahwa pendapatan atau nilai tambah yang diperoleh dari penghitungan PDB menurut lapangan usaha “identik” dengan PDB menurut pengeluaran. Apabila Y adalah pendapatan dan C adalah konsumsi akhir, kemudian GFCF serta Δ Inventori menggambarkan investasi (fisik), maka selisih ekspor dikurangi impor mengekspresikan surplus atau defisit yang berasal dari perdagangan berbagai barang dan jasa dengan luar negeri. Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi akhir atau juga

untuk investasi (khususnya fisik). Selain itu juga dapat diketahui seberapa besar ketergantungan ekonomi domestik (wilayah) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dengan impor disebut sebagai "ekspor neto" yang juga memberikan gambaran tentang tabungan luar negeri.

Sama halnya dengan pendekatan lapangan usaha, PDB sisi pengeluaran atau permintaan akhir juga menghasilkan agregat ekonomi makro seperti nilai nominal, struktur, komposisi atau distribusi penggunaan akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit masing-masing komponen maupun keseluruhan PDB (E). Selain menurut masing-masing komponen pengeluaran, pada publikasi ini juga disajikan beberapa agregat makro lain yang berkaitan erat dengan PDB, seperti Pendapatan Nasional (*National Income*). Angka Pendapatan Nasional merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Selain itu disajikan juga data PDB per kapita, untuk melihat ukuran pemerataan, baik rata-rata tingkat produktivitas, maupun tingkat kemakmuran masyarakat, secara individu.

Untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan PDB sisi pengeluaran dari waktu ke waktu, disajikan pula data runtun waktu (*time series*) dalam bentuk angka indeks (indeks berantai maupun perkembangan) dari masing-masing komponen penggunaan akhir, berikut agregat turunannya. Indeks berantai bermanfaat untuk melihat perubahan volume maupun harga antar dua titik waktu yang berurutan, sedangkan indeks perkembangan untuk melihat perubahan volume maupun harga secara kumulatif dalam satu periode tertentu. Indeks tersebut diturunkan dari hasil perhitungan PDB atas dasar harga berlaku (*adh berlaku*) maupun atas dasar harga konstan (*adh konstan*) 2010, dari tahun 2013 s.d 2017.

<https://www.bps.go.id>

BAB II

TINJAUAN AGREGAT PDB INDONESIA MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017

Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia dapat tumbuh relatif stabil seiring membaiknya perekonomian global. Secara tahunan, pertumbuhan tahun 2013 sampai dengan 2017 secara berturut-turut yaitu 5,56 persen, 5,01 persen, 4,88 persen, 5,03 persen, dan 5,07 persen. Ketahanan ekonomi tersebut tergambar melalui pertumbuhan pada sektor produksi (*supply side*), maupun melalui pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (*demand side*). Pada sisi produksi, pertumbuhan tertinggi ada pada kategori informasi dan komunikasi yang setiap tahunnya tumbuh 8-10 persen, sedangkan karakteristik pertumbuhan pada sisi permintaan akhir tetap didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Tabel 1. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013-2017

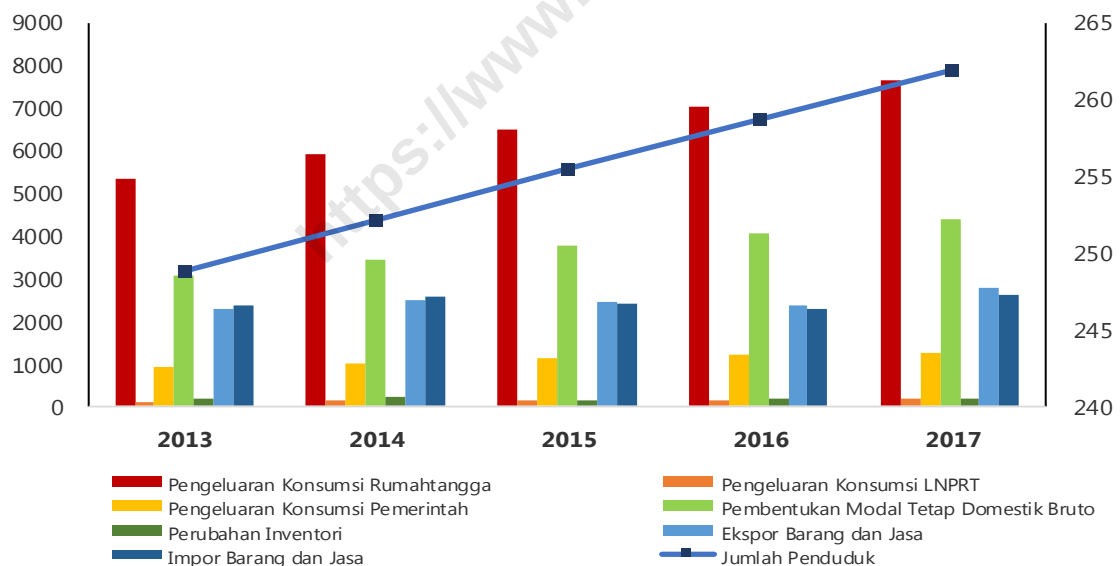
(Miliar Rp)					
Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	5.321.087,6	5.915.194,2	6.490.929,7	7.024.996,8	7.626.985,6
2 Konsumsi LNPRT	103.929,0	124.242,0	130.950,6	144.499,4	160.569,5
3 Konsumsi Pemerintah	908.574,3	996.197,4	1.123.749,9	1.183.640,3	1.236.869,0
4 PMTB	3.051.496,2	3.436.923,7	3.782.011,9	4.040.204,6	4.370.555,8
5 Perubahan Inventori	178.090,5	220.230,6	144.178,9	158.867,1	174.517,9
6 Ekspor Barang dan Jasa	2.283.776,7	2.501.424,8	2.438.992,7	2.372.293,3	2.768.148,8
7 Impor Barang dan Jasa	2.359.212,1	2.580.508,0	2.394.879,3	2.272.665,8	2.604.350,1
Total PDB	9.546.134,0	10.569.705,3	11.526.332,8	12.406.774,1	13.588.797,3
Diskrepani Statistik ⁴	58.391,8	-43.999,4	-189.601,6	-245.061,6	-144.499,2

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

⁴ Perbedaan antara total PDB Lapangan Usaha dan PDB Pengeluaran

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017, nilai PDB Indonesia atas dasar harga (adh) berlaku menunjukkan peningkatan cukup signifikan, yakni berturut-turut sebesar 9.546.134,0 miliar rupiah (2013); 10.569.705,3 miliar rupiah (2014); 11.526.332,8 miliar rupiah (2015); 12.406.774,1 miliar rupiah (2016); dan 13.588.797,3 miliar rupiah (2017). Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga maupun volume. Peningkatan PDB dari sisi nilai tambah, tentu diikuti oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran PDB (*demand side*) yang akan diuraikan lebih lanjut dalam publikasi ini.

Grafik 1. Produk Domestik Bruto Indonesia adh Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran (triliun rupiah) dan Estimasi Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (juta jiwa) Tahun 2013 – 2017



Selain dinilai adh berlaku, PDB menurut pengeluaran juga dinilai adh konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang divalusi dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan itu, maka PDB untuk masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDB komponen pengeluaran atas dasar harga

konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2013-2017, gambaran tentang nilai PDB adh konstan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut.

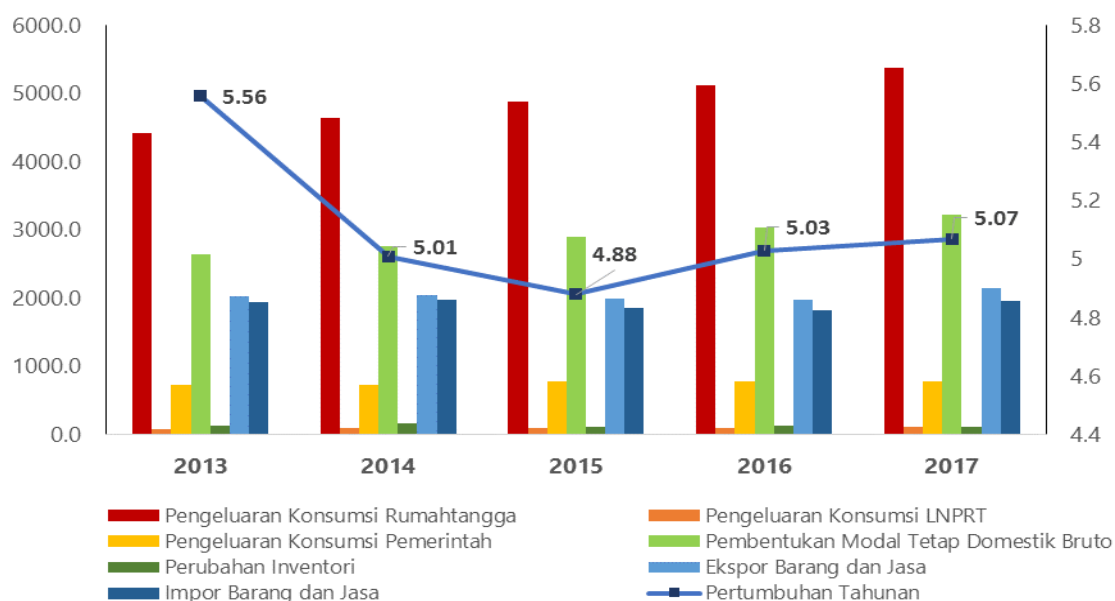
Tabel 2. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013-2017

(Miliar Rp)

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	4.423.416,9	4.651.018,4	4.881.630,7	5.126.028,3	5.379.519,7
2 Konsumsi LNPRT	88.618,0	99.420,0	98.800,0	105.362,3	112.646,9
3 Konsumsi Pemerintah	727.812,1	736.283,1	775.398,0	774.281,6	790.858,3
4 PMTB	2.654.375,0	2.772.470,8	2.911.356,0	3.041.586,6	3.228.747,5
5 Perubahan Inventori	124.453,6	163.582,6	112.847,9	133.400,1	115.396,4
6 Ekspor Barang dan Jasa	2.026.113,7	2.047.887,1	2.004.467,0	1.973.040,4	2.152.404,1
7 Impor Barang dan Jasa	1.945.867,3	1.987.113,9	1.862.939,0	1.817.369,5	1.963.783,7
Total PDB	8.156.497,8	8.564.866,6	8.982.517,1	9.434.632,3	9.912.749,3
Diskrepansi Statistik	57.575,8	81.318,5	60.956,5	98.302,5	96.960,1

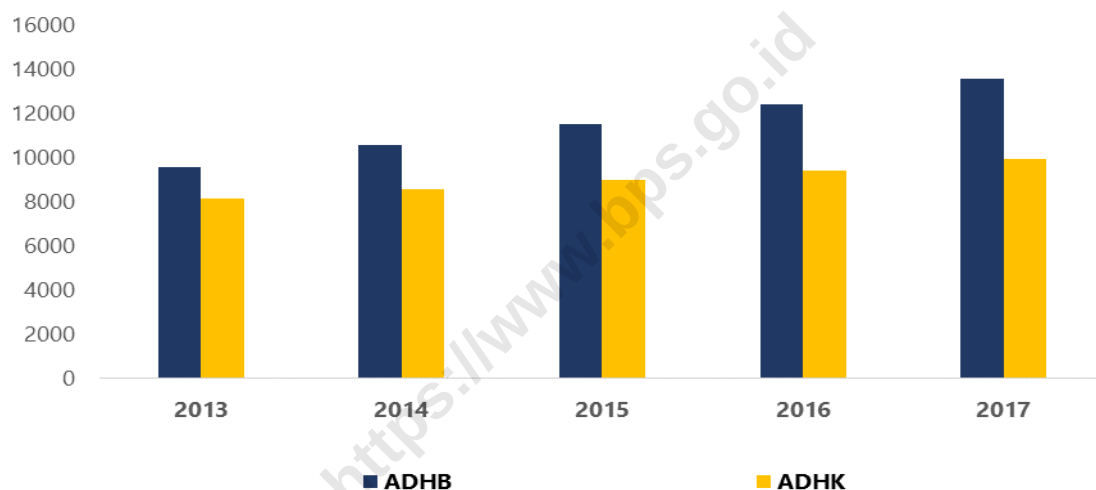
Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Grafik 2. Produk Domestik Bruto Indonesia adh Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (triliun rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (persen) Tahun 2013-2017



Dari tabel 2. nilai PDB adh konstan menunjukkan peningkatan tiap tahunnya yaitu masing-masing sebesar 8.156.497,8 miliar rupiah (2013); 8.564.866,6 miliar rupiah (2014); 8.982.517,1 miliar rupiah (2015); 9.434.632,3 miliar rupiah (2016); dan 9.912.749,3 miliar rupiah (2017). Sedangkan pada grafik 2. Terlihat selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,56 persen pada tahun 2013 menjadi 5,07 persen pada tahun 2017.

Grafik 3. Perbandingan Produk Domestik Bruto Indonesia adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017 (triliun rupiah)



Grafik di atas menunjukkan bahwa umumnya nilai PDB adh berlaku selalu lebih tinggi dari nilai PDB adh konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga yang cenderung selalu meningkat dalam perhitungan PDB adh berlaku, sedangkan dalam PDB adh konstan pengaruh faktor harga telah diabaikan. Sama halnya dengan PDB adh berlaku, sebagian besar komponen pengeluaran akhir PDB adh konstan menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDB merupakan kontribusi dari seluruh komponen pengeluaran, yang terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran

Konsumsi Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor neto (E) atau Ekspor Barang dan Jasa minus Impor Barang dan Jasa. Terlihat bahwa selama periode 2013-2017, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Pengeluaran untuk pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 31 s.d 33 persen dan komponen ekspor barang dan jasa berperan sekitar 19 s.d 24 persen. Di sisi lain, impor barang dan jasa sebagai komponen pengurang pada PDB masih mempunyai peran yang relatif besar, yaitu sekitar 18 s.d 25 persen yang artinya sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk dari impor.

Tabel 3. Distribusi Setiap Komponen Pengeluaran terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (persen)

(Persen)					
Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	55,74	55,96	56,31	56,62	56,13
2 Konsumsi LNPRT	1,09	1,18	1,14	1,16	1,18
3 Konsumsi Pemerintah	9,52	9,43	9,75	9,54	9,10
4 PMTB	31,97	32,52	32,81	32,56	32,16
5 Perubahan Inventori	1,87	2,08	1,25	1,28	1,28
6 Ekspor Barang dan Jasa	23,92	23,67	21,16	19,12	20,37
7 Impor Barang dan Jasa	24,71	24,41	20,78	18,32	19,17
Total PDB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Diskrepansi Statistik	0,60	-0,43	-1,64	-1,96	-1,05

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 9,10 – 9,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2015 - 2017 perdagangan internasional Indonesia yang

direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor barang dan jasa, menunjukkan bahwa nilai ekspor barang dan jasa cenderung lebih tinggi dari nilai impor barang dan jasa. Kecenderungan perdagangan internasional Indonesia dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi surplus. Sedangkan tahun 2013-2014 perdagangan internasional Indonesia menunjukkan nilai ekspor barang dan jasa lebih rendah dari nilai impor barang dan jasa yang menunjukkan dalam kondisi defisit.

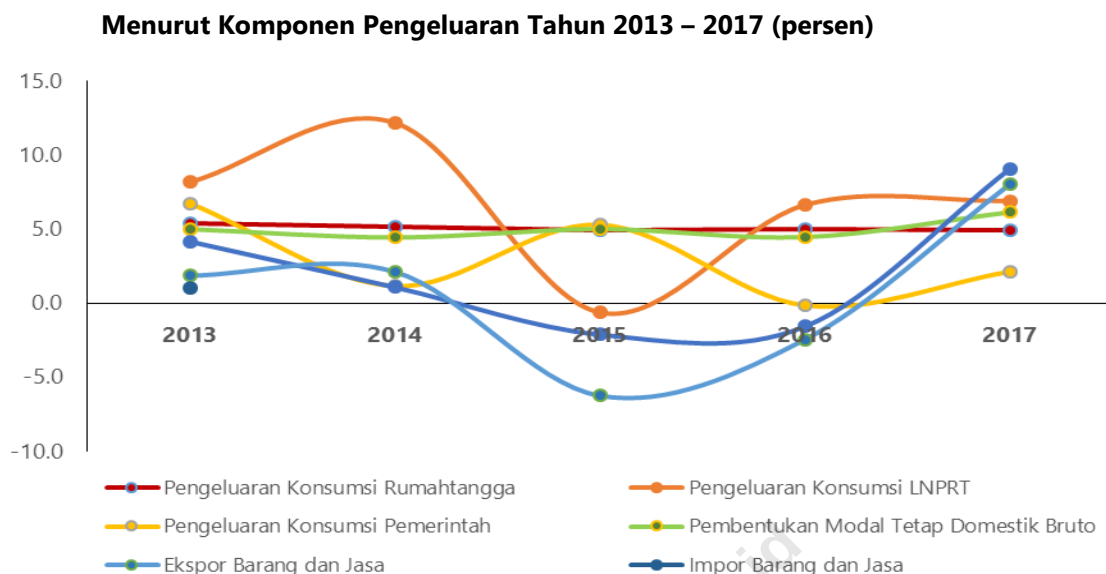
Tabel 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013-2017 (persen)

(Persen)					
Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	5,43	5,15	4,96	5,01	4,95
2 Konsumsi LNPRT	8,18	12,19	-0,62	6,64	6,91
3 Konsumsi Pemerintah	6,75	1,16	5,31	-0,14	2,14
4 PMTB	5,01	4,45	5,01	4,47	6,15
5 Ekspor Barang dan Jasa	4,17	1,07	-2,12	-1,57	9,09
6 Impor Barang dan Jasa	1,86	2,12	-6,25	-2,45	8,06
Total PDB	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDB adalah pertumbuhan riil PDB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dari tahun 2013 s.d 2017 masing-masing sebesar 5,56 persen (2013); 5,01 persen (2014); 4,88 persen (2015); 5,03 persen (2016) dan 5,07 persen (2017).

Grafik 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010



Sementara itu, indeks implisit⁵ PDB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Kumulatif kenaikan harga PDB yang terjadi sepanjang tahun 2010 - 2017 adalah sebesar 37,08 persen.

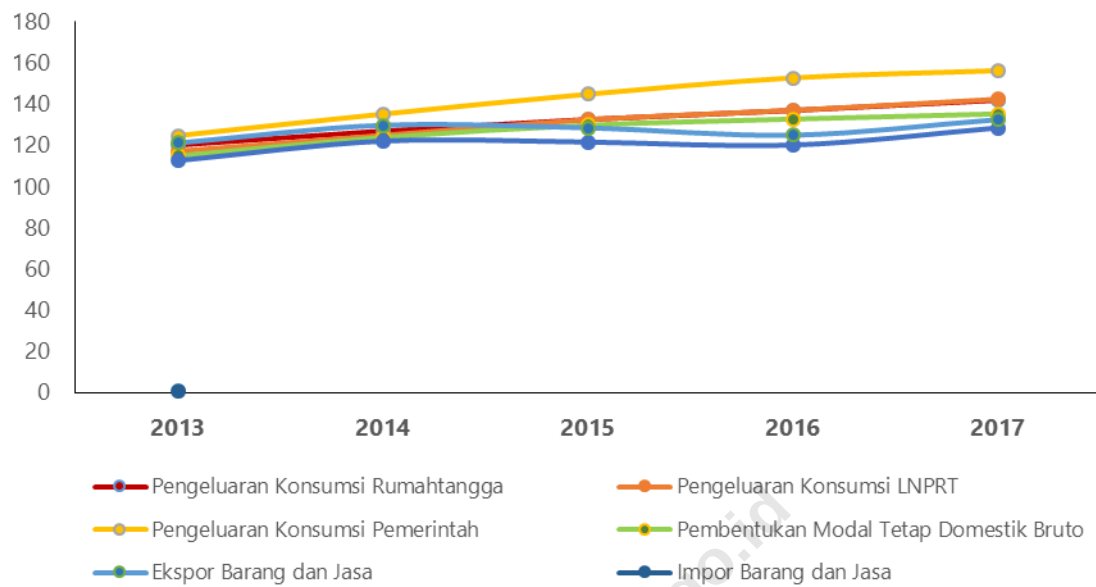
Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013 – 2017 (persen)

		(Persen)				
Uraian		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1 Konsumsi Rumah Tangga	120,29	127,18	132,97	137,05	141,78	
2 Konsumsi LNPRT	117,28	124,97	132,54	137,15	142,54	
3 Konsumsi Pemerintah	124,84	135,30	144,93	152,87	156,40	
4 PMTB	114,96	123,97	129,91	132,83	135,36	
5 Ekspor Barang dan Jasa	112,72	122,15	121,68	120,24	128,61	
6 Impor Barang dan Jasa	121,24	129,86	128,55	125,05	132,62	
Total PDB	117,04	123,41	128,32	131,50	137,08	

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

⁵ Indeks perkembangan

Grafik 5. Indeks Implisit Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013 – 2017



BAB III

PERKEMBANGAN MASING-MASING KOMPONEN PDB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013 - 2017

Perubahan struktur ekonomi Indonesia akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2013 s.d 2017, tidak terlepas dari perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah, kemudian sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu diuraikan pada bagian berikut.

3.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga merupakan porsi terbesar dalam pengeluaran akhir berbagai barang dan jasa, baik yang berasal dari domestik maupun impor. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah (PDB) yang diciptakan, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga, dengan kata lain bahwa sebagian besar dari produk domestik yang dihasilkan di Indonesia dan produk impor yang didatangkan dari luar negeri akan digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Fungsi rumah tangga yang utama adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) dari barang dan jasa yang tersedia, termasuk pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, pengeluaran konsumsi rumah

tangga dikelompokkan berdasarkan 12 (dua belas) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*) yang pada publikasi ini disajikan menjadi 7 kelompok yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel; serta lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh berlaku) maupun riil (adh konstan). Secara nominal, total konsumsi rumah tangga pada tahun 2013 mencapai 5.321.087,6 miliar rupiah, selanjutnya meningkat mencapai 5.915.194,2 miliar rupiah (2014); 6.490.929,7 miliar rupiah (2015); 7.024.996,8 miliar rupiah (2016); dan 7.626.985,6 miliar rupiah (2017). Begitu pula jika dilihat secara riil, total konsumsi rumah tangga pada tahun 2013 mencapai 4.423.416,9 miliar rupiah, kemudian meningkat mencapai 4.651.018,4 miliar rupiah (2014); 4.881.630,7 miliar rupiah (2015); 5.126.028,3 miliar rupiah (2016); dan 5.379.519,7 miliar rupiah (2017). Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB pada periode tahun 2013 s.d 2016 cenderung meningkat, mulai dari 55,74 persen (2013); 55,96 persen (2014); 56,31 persen (2015); dan 56,62 persen (2016). Kemudian sedikit menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 56,13 persen. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 56,62 persen dan titik terendah pada tahun 2013 yaitu 55,74 persen. Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan

kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

**Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	5.321.087,6	5.915.194,2	6.490.929,7	7.024.996,8	7.626.985,6
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	4.423.416,9	4.651.018,4	4.881.630,7	5.126.028,3	5.379.519,7
Proporsi terhadap PDB (% ADHB)	55,74	55,96	56,31	56,62	56,13
Rata-rata Konsumsi Akhir Per RT Per Tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	83.169,9	91.254,0	98.963,2	105.821,3	113.541,7
b. ADHK 2010	69.139,1	71.751,5	74.427,2	77.216,1	80.084,0
Rata-rata Konsumsi Akhir Per Kapita Per Tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	21.385,5	23.457,6	25.408,6	27.154,5	29.122,7
b. ADHK 2010	17.777,7	18.444,3	19.109,0	19.814,2	20.541,1
Pertumbuhan ⁶					
a. Total konsumsi akhir RT	5,43	5,15	4,96	5,01	4,95
b. Per RT	2,59	3,78	3,73	3,75	3,71
c. Per Kapita	3,99	3,75	3,60	3,69	3,67
Jumlah RT (<i>unit</i>)	63.978.502	64.821.204	65.589.302	66.385.444	67.173.449
Jumlah Penduduk (<i>000 org</i>)	248.818	252.165	255.462	258.705	261.891

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Secara umum, rata-rata konsumsi akhir per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adh berlaku maupun adh konstan 2010. Pada tahun 2013, secara umum setiap rumah tangga di Indonesia menghabiskan dana sekitar 83.169,9 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel; serta lainnya. Pengeluaran ini terus meningkat

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDB (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK2010)

menjadi 91.254,0 ribu rupiah (2014); 98.963,2 ribu rupiah (2015); 105.821,3 ribu rupiah (2016); dan 113.541,7 ribu rupiah (2017). Sementara itu, pada perkiraan adh konstan (2010) rata-rata konsumsi akhir per rumah tangga tumbuh pada kisaran 2,59-3,78 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 3,78 persen.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi akhir per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Rata-rata konsumsi akhir per kapita pada tahun 2013 sebesar 21.385,5 ribu rupiah, kemudian meningkat menjadi sebesar 29.122,7 ribu rupiah pada tahun 2017. Selain itu, pertumbuhan rata-rata konsumsi akhir per kapita baik adh berlaku maupun adh konstan 2010 menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Indonesia meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara "riil" berkisar antara 3,60 s.d 3,99 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga adh konstan sebesar 5,43 persen pada tahun 2013. Kemudian semakin menurun menjadi sebesar 5,15 persen (2014); dan 4,96 persen (2015). Sedangkan pada tahun 2016, pertumbuhan tersebut sedikit meningkat menjadi 5,01 persen. Namun, pada tahun 2017 melambat kembali menjadi 4,95 persen. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per kapita pada tahun 2013 sebesar 3,99 persen, kemudian menurun menjadi 3,75 persen (2014); dan 3,60 persen (2015). Sedangkan pada tahun 2016 menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 3,69 persen (2016); selanjutnya menurun kembali menjadi 3,67 persen pada tahun 2017. Terlihat bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" lebih tinggi

dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 1,50 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDB ini.

**Tabel 7. Struktur dan Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir Rumah Tangga⁷					
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran (<i>Miliar Rp</i>)	2.049.781,9	2.247.450,6	2.495.433,4	2.758.583,1	2.980.445,9
Persentase (%)	38,52	37,99	38,44	39,27	39,08
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya (<i>Miliar Rp</i>)	203.088,5	221.633,2	239.644,4	256.799,9	272.918,1
Persentase (%)	3,82	3,75	3,69	3,66	3,58
c. Perumahan & Perlengkapan Rumah tangga (<i>Miliar Rp</i>)	705.521,6	774.867,4	849.310,4	902.130,9	979.454,6
Persentase (%)	13,26	13,10	13,08	12,84	12,84
d. Kesehatan dan Pendidikan (<i>Miliar Rp</i>)	359.752,4	394.267,5	433.073,0	472.128,0	515.369,7
Persentase (%)	6,76	6,67	6,67	6,72	6,76
e. Transportasi dan Komunikasi (<i>Miliar Rp</i>)	1.246.466,6	1.420.289,2	1.518.754,7	1.598.864,1	1.759.058,5
Persentase (%)	23,43	24,01	23,40	22,76	23,06
f. Restoran dan Hotel (<i>Miliar Rp</i>)	499.345,5	570.464,7	636.959,3	695.183,0	75.928,6
Persentase (%)	9,38	9,64	9,81	9,90	9,92
g. Lainnya (<i>Miliar Rp</i>)	257.131,1	286.221,7	317.754,5	341.307,8	362.810,2
Persentase (%)	4,83	4,84	4,90	4,86	4,76
Total Konsumsi (<i>Miliar Rp</i>)	5.321.087,6	5.915.194,2	6.490.929,7	7.024.996,8	7.626.985,6
Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan Riil (ADHK)					
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	4,35	4,49	5,41	5,34	5,24
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	5,28	4,59	4,39	3,29	3,10
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	5,81	4,57	4,81	4,60	4,26
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,72	5,77	5,45	5,34	5,59
e. Transportasi dan Komunikasi	6,60	5,80	4,78	5,32	5,30
f. Restoran dan Hotel	5,76	6,68	5,01	5,40	5,53
g. Lainnya	5,70	5,13	2,79	2,41	2,44
Total Konsumsi	5,43	5,15	4,96	5,01	4,95
Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga)⁸					
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	5,92	4,94	5,34	4,94	2,66
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	3,13	4,34	3,58	3,75	3,08
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	4,67	5,03	4,58	1,55	4,14
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,83	3,61	4,17	3,49	3,38
e. Transportasi dan Komunikasi	7,67	7,70	2,05	-0,04	4,49
f. Restoran dan Hotel	6,56	7,09	6,33	3,55	3,18
g. Lainnya	4,29	5,88	8,00	4,89	3,77
Total Konsumsi	5,84	5,73	4,55	3,07	3,45

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

7 Diturunkan dari perhitungan PDB (Atas Dasar Harga Berlaku / ADHB)

8 Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Selama kurun waktu 2013 s.d 2017, struktur konsumsi akhir rumah tangga Indonesia di dominasi oleh konsumsi makanan dan minuman selain restoran. Proporsi untuk makanan dan minuman selain restoran pada masing-masing tahun mencapai 38,52 persen (2013); 37,99 persen (2014); 38,44 persen (2015); 39,27 persen (2016) dan 39,08 persen (2017).

Struktur konsumsi akhir rumah tangga yang memiliki proporsi tertinggi setelah kelompok makanan dan minuman selain restoran adalah kelompok transportasi dan komunikasi. Persentase kelompok transportasi dan komunikasi terhadap total konsumsi akhir rumah tangga pada tiap tahunnya adalah sebesar 23,43 persen (2013); 24,01 persen (2014); 23,40 persen (2015); 22,76 persen (2016); dan 23,06 persen (2017). Kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga juga memiliki kontribusi yang cukup tinggi yaitu pada kisaran 12-13 persen, sedangkan kelompok restoran dan hotel, kelompok kesehatan dan pendidikan, kelompok pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya serta kelompok lainnya memiliki proporsi yang relatif kecil terhadap total konsumsi rumah tangga.

Dilihat dari pertumbuhan riil nya, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga untuk kelompok makanan dan minuman selain restoran menunjukkan kecenderungan meningkat, masing-masing sebesar 4,35 persen (2013); 4,49 persen (2014); dan 5,41 persen (2015), selanjutnya sedikit menurun menjadi 5,34 persen (2016) dan 5,24 persen (2017). Pertumbuhan riil ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi akhir rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam perangkat data tersebut, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,84 persen, dimana harga kelompok transportasi dan komunikasi meningkat lebih tinggi dari kelompok yang lainnya. Pada tahun-tahun berikutnya peningkatan harga relatif berfluktuasi pada masing-masing kelompok. Peningkatan harga (inflasi) pada tahun 2017 sebesar 3,45 persen, dimana harga kelompok transportasi dan komunikasi tetap lebih tinggi dibanding kelompok lainnya.

3.2. Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga

Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan komponen baru pada series tahun dasar 2010. Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga merupakan salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Total pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dalam kurun waktu tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan baik adh berlaku maupun adh konstan. Pada tahun 2013 pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 103.929,0 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar 124.242,0 miliar rupiah (2014), 130.950,6 miliar rupiah (2015), 144.499,4 miliar rupiah (2016); dan 160.569,5 miliar rupiah (2017). Proporsi total pengeluaran konsumsi akhir LNPRT terhadap PDB relatif kecil yaitu sebesar 1,09 persen (2013); 1,18 persen (2014); 1,14 persen (2015); 1,16 persen (2016); dan 1,18 persen (2017).

**Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT
Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Akhir LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	103.929,0	124.242,0	130.950,6	144.499,4	160.569,5
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	88.618,0	99.420,3	98.800,0	105.362,3	112.646,9
Proporsi terhadap PDB (% ADHB)	1,09	1,18	1,14	1,16	1,18
<u>Pertumbuhan</u>					
Total Konsumsi Akhir LNPRT	8,18	12,19	-0,62	6,64	6,91

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT adh konstan tahun dasar 2010 pada tahun 2013 sebesar 8,18 persen kemudian mengalami peningkatan yaitu sebesar 12,19 persen (2014). Sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT tumbuh minus 0,62 persen. Selanjutnya pada tahun 2016 pertumbuhan tersebut meningkat kembali menjadi sebesar 6,64 persen dan 6,91 persen pada tahun 2017.

3.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Konsumsi akhir pemerintah terdiri dari konsumsi individu dan konsumsi kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik untuk *adh berlaku* maupun *adh konstan* 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adh berlaku* sebesar 908.574,3 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya menjadi sebesar 996.197,4 miliar rupiah (2014); 1.123.749,9 miliar rupiah (2015); 1.183.640,3 miliar rupiah (2016) dan 1.236.869,0 miliar rupiah (2017). Demikian halnya dengan konsumsi akhir pemerintah *adh konstan* 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Proporsi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terhadap PDB tahun 2013-2017 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2013 sebesar 9,52 persen kemudian menurun menjadi 9,43 persen (2014). Pada tahun 2015, proporsi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terhadap PDB sedikit meningkat mencapai 9,75 persen. Selanjutnya, pada tahun 2016 dan 2017 menurun kembali menjadi sebesar 9,54 persen dan 9,10 persen. Sepanjang periode 2013-2017, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 9,10 persen, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 9,75 persen. Porsi konsumsi akhir

pemerintah tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan konsumsi akhir pemerintah juga menjadi salah satu unsur pendorong dalam meningkatkan besaran nilai PDB.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Akhir Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	908.574,3	996.197,4	1.123.749,9	1.183.640,3	1.236.869,0
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	727.812,1	736.283,1	775.398,0	774.281,6	790.858,3
Proporsi terhadap PDB (% ADHB)	9,52	9,43	9,75	9,54	9,10
Konsumsi Akhir Pemerintah Per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	3.651,6	3.950,6	4.398,9	4.575,3	4.722,8
b. ADHK 2010	2.925,1	2.919,8	3.035,3	2.992,9	3.019,8
Konsumsi Akhir Pemerintah Per Pegawai Pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	208.254,6	223.598,1	246.521,5	270.586,6	287.360,3
b. ADHK 2010	166.822,1	165.259,9	170.102,2	177.005,0	183.739,2
Pertumbuhan ⁹					
a. Total Konsumsi Akhir pemerintah	6,75	1,16	5,31	-0,14	2,14
b. Konsumsi Per Kapita	5,29	-0,18	3,95	-1,40	0,90
c. Konsumsi Per Pegawai	9,32	-0,94	2,93	4,06	3,80
Jumlah Pegawai Pemerintah ¹⁰	4.362.805	4.455.303	4.558.425	4.374.349	4.304.244
Jumlah Penduduk (<i>000 org</i>)	248.818	252.165	255.462	258.705	261.891
Rasio Penduduk terhadap Pegawai Pemerintah	57,03	56,60	56,04	59,14	60,84

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDB (Atas Dasar Harga Konstan/ ADHK 2010)

¹⁰ Tidak termasuk polisi dan militer

pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi akhir pemerintah per kapita. Pada tahun 2013 konsumsi akhir pemerintah per kapita adh berlaku sebesar 3.651,6 ribu rupiah, terus meningkat pada tahun selanjutnya, yaitu 3.950,6 ribu rupiah (2014); 4.398,9 ribu rupiah (2015); 4.575,3 ribu rupiah (2016) dan 4.722,8 ribu rupiah (2017).

Rata-rata konsumsi akhir pemerintah per kapita adh konstan 2010 selama kurun waktu 2013-2017 berturut-turut yaitu senilai 2.925,1 ribu rupiah (2013); 2.919,8 ribu rupiah (2014); 3.035,3 ribu rupiah (2015); 2.992,9 ribu rupiah (2016) dan 3.019,8 ribu rupiah (2017). Konsumsi akhir pemerintah per kapita adh konstan ini menunjukkan adanya pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,29 persen (2013). Pada tahun 2014 pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah per kapita tumbuh minus 0,18 persen, kemudian pada tahun 2015 tumbuh sebesar 3,95 persen dan kembali tumbuh minus 1,40 persen (2016). Pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah perkapita pada tahun 2017 mengalami perbaikan, yaitu sebesar 0,90 persen.

Rata-rata konsumsi akhir per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2013 konsumsi akhir per pegawai pemerintah sebesar 208.254,6 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 223.598,1 ribu rupiah (2014); 246.521,5 ribu rupiah (2015); 270.586,6 ribu rupiah (2016) dan 287.360,3 ribu rupiah (2017). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, yaitu sebesar 166.822,1 ribu rupiah tahun 2013, terus meningkat menjadi 165.259,9 ribu rupiah (2014); 170.102,2 ribu rupiah (2015); 177.005 ribu rupiah (2016); dan 183.739,2 ribu rupiah (2017).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik adh berlaku maupun adh konstan 2010), tetapi tidak diikuti dengan kenaikan jumlah pegawai pemerintah untuk tiap tahunnya. Pada periode tahun 2013 s.d 2015 jumlah pegawai pemerintah mengalami peningkatan dengan posisi pada masing-masing tahun sebesar 4.362.805 orang (2013); 4.455.303 orang (2014); dan 4.588.425 orang (2015). Namun pada tahun 2016 dan 2017 jumlah pegawai mengalami penurunan menjadi 4.374.349 orang dan 4.304.244 orang. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah selama tahun 2013-2017 berfluktuatif, disebabkan oleh adanya sejumlah pegawai yang pensiun dan pegawai baru yang diterima oleh pemerintah.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara riil menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2015, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 6,75 persen dan 5,31 persen; untuk konsumsi per kapita 5,29 persen (2013) dan 3,95 persen (2015); sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2016 yaitu 9,32 persen dan 4,06 persen.

Rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah pegawai pemerintah selama periode 2013-2017 adalah 57,03 (2013); 56,60 (2014); 56,04 (2015); 59,14 (2016); dan 60,84 (2017);. Artinya jika pada tahun 2013 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 57 penduduk, maka pada tahun 2014 dan 2015 satu pegawai pemerintah melayani sekitar 56 penduduk; tahun 2016 satu pegawai pemerintah melayani sekitar 59 penduduk; dan tahun 2017 satu pegawai pemerintah melayani sekitar 60 penduduk.

Tabel 10. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Indonesia

Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir Pemerintah ¹¹					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	568.131,1	622.774,3	691.754,8	732.490,2	763.292,9
Persentase (%)	62,53	62,52	61,56	61,88	61,71
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	340.443,2	373.423,2	431.995,0	451.150,1	473.576,1
Persentase (%)	37,47	37,48	38,44	38,12	38,29
Total Konsumsi (Miliar Rp)	908.574,3	996.197,4	1.123.749,9	1.183.640,3	1.236.869,0
Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan Ril (ADHK) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	8,32	0,81	3,76	0,16	1,51
b. Konsumsi Individu	4,21	1,75	7,91	-0,64	3,16
Total Konsumsi	6,75	1,16	5,31	-0,14	2,14

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Secara struktur, bagian terbesar dari konsumsi akhir pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif, yaitu seluruh biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghasilkan barang dan jasa kolektif. Sekitar 61-63 persen pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai belanja rutin tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari sebesar 568.131,1 miliar rupiah (2013) menjadi 622.774,3 miliar rupiah (2014), 691.754,8 miliar rupiah (2015), 732.490,2 miliar rupiah (2016) dan 763.292,9 miliar rupiah (2017). Demikian pula dengan proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah. Pada tahun 2013 proporsinya mencapai 62,53 persen, kemudian terjadi sedikit penurunan menjadi sebesar 62,52 persen pada tahun 2014 dan 61,56 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi 61,88 persen, sedangkan pada tahun 2017 menurun kembali menjadi sebesar 61,71 persen.

11 Diturunkan dari perhitungan PDB (Atas Dasar Harga Berlaku /ADHB)

Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan, dari 340.443,2 miliar rupiah tahun 2013 meningkat menjadi 373.423,2 miliar rupiah pada tahun 2014. Pada tahun 2015, konsumsi individu pemerintah menurun menjadi 431.995,0 miliar rupiah, kemudian meningkat kembali menjadi 451.150,1 miliar rupiah pada tahun 2016 dan 473.576,1 miliar rupiah pada tahun 2017. Secara umum proporsi belanja konsumsi individu cenderung meningkat, yaitu sebesar 37,47 persen (2013); 37,48 persen (2014); dan 38,44 persen (2015). Namun pada tahun 2016 proporsi belanja konsumsi individu pemerintah menurun menjadi 38,12 persen. Kemudian pada tahun 2017 proporsi tersebut meningkat kembali menjadi sebesar 38,29 persen.

3.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasi menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 6 (enam) kelompok yaitu: Bangunan, Mesin dan Perlengkapan, Kendaraan, Peralatan lainnya, *Cultivated Biological Resources* (CBR), dan Produk Kekayaan Intelektual. Data di bawah ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam periode 2013-2017 meningkat dari 5,01 persen (2013) menjadi 6,15 persen pada tahun 2017. Bangunan, baik

12 Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

dalam bentuk bangunan tempat tinggal (*residential building*) maupun bangunan bukan tempat tinggal (*non-residential building*) merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap yaitu mencapai di atas 73 persen dari total PMTB. Pertumbuhan di sektor bangunan cenderung stabil yaitu 6,74 persen (2013), 5,52 persen (2014), 6,11 persen (2015), 5,18 persen (2016), dan 6,24 persen (2017). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013.

Proporsi terbesar ke dua setelah bangunan adalah investasi pada kelompok mesin dan perlengkapannya. Proporsi kelompok mesin dan perlengkapan terhadap total PMTB selama periode 2013-2017 cenderung menurun tiap tahunnya yaitu sebesar 11,24 persen (2013); 10,40 persen (2014); 9,98 persen (2015); 9,03 persen (2016); dan 9,29 persen (2017). Pertumbuhan kelompok barang modal mesin dan perlengkapan mencapai 0,37 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 barang modal mesin dan perlengkapan mengalami perlambatan hingga mencapai minus 2,48 persen. Pada tahun 2015, pertumbuhan barang modal mesin dan perlengkapan mulai membaik hingga mencapai 0,58 persen. Namun, pertumbuhan barang modal mesin dan perlengkapan kembali melambat cukup tajam sebesar minus 6,69 persen, kemudian kembali membaik hingga mencapai 9,51 persen pada tahun 2017.

Kontribusi barang modal kendaraan terhadap PMTB relatif stabil sekitar 4-6 persen. Kontribusi secara berturut-turut setiap tahunnya yaitu 5,65 persen (2013); 4,76 persen (2014); 4,60 persen (2015); 5,15 persen (2016); dan 5,35 persen (2017). Pertumbuhan "riil" barang modal kendaraan pada tahun 2013 sebesar minus 5,64 persen kemudian pada tahun 2014 dan 2015 menurun menjadi minus 5,88 persen dan 0,52 persen. Pada tahun 2016 dan 2017 pertumbuhan barang modal kendaraan meningkat hingga 12,03 persen dan 8,86 persen.

**Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Indonesia
Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.051.496,2	3.436.923,7	3.782.011,9	4.040.204,6	4.370.555,8
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.654.375,0	2.772.470,8	2.911.356,0	3.041.586,6	3.228.747,5
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	31,97	32,52	32,81	32,56	32,16
Struktur PMTB ¹³					
a. Bangunan (miliar Rp)	2.242.779,8	2.569.122,4	2.844.114,6	3.037.239,9	3.283.435,9
Persentase (%)	73,50	74,75	75,20	75,1	75,13
b. Mesin & Perlengkapan (miliar Rp)	343.132,0	357.548,3	377.471,6	364.798,1	405.905,6
Persentase (%)	11,24	10,40	9,98	9,03	9,29
c. Kendaraan (miliar Rp)	172.446,3	163.609,3	173.850,6	208.133,1	233.928,5
Persentase (%)	5,65	4,76	4,60	5,15	5,35
d. Peralatan Lainnya (miliar Rp)	41.709,1	49.215,1	59.036,1	68.916,2	77.501,4
Persentase (%)	1,37	1,43	1,56	1,71	1,77
e. CBR (miliar Rp)	177.279,6	201.675,9	225.515,5	246.684,1	254.684,5
Persentase (%)	5,81	5,87	5,96	6,11	5,83
f. Produk Kekayaan Intelektual (miliar Rp)	74.149,2	95.752,8	102.023,4	114.433,3	115.099,8
Persentase (%)	2,43	2,79	2,70	2,83	2,63
Total PMTB (Miliar Rp)	3.051.496,1	3.436.923,7	3.782.011,9	4.040.204,6	4.370.555,8
Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁴ (%)					
a. Bangunan	6,74	5,52	6,11	5,18	6,24
b. Mesin dan Perlengkapan	0,37	(2,48)	0,58	(6,69)	9,51
c. Kendaraan	(5,64)	(5,88)	0,52	12,03	8,86
d. Peralatan Lainnya	4,36	9,18	9,71	12,92	9,26
e. CBR	1,58	7,53	3,63	4,79	1,01
f. Produk Kekayaan Intelektual	16,54	21,38	2,28	7,69	-3,83
Total PMTB	5,01	4,45	5,01	4,47	6,15

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Barang modal peralatan lainnya memiliki kontribusi masing-masing sebesar 1,37 persen (2013); 1,43 persen (2014); 1,56 persen (2015), 1,71 persen (2016), dan 1,77 persen (2017). Pertumbuhan barang modal peralatan lainnya mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2013 sebesar 4,36. Namun pada tahun 2014-2016 pertumbuhan barang modal peralatan lainnya mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar 9,18 persen; 9,71 persen; dan 12,92 persen. Sedangkan pada tahun 2017, pertumbuhan barang modal lainnya menurun menjadi sebesar 9,26 persen.

13 Diturunkan dari perhitungan PDB (Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB)

14 Diturunkan dari perhitungan PDB (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK 2010)

Dilihat dari struktur *Cultivated Biological Resources* (CBR) terhadap total PMTB, CBR memiliki kontribusi berkisar 5,81-6,11 persen yaitu sebesar 5,81 persen pada tahun 2013; 5,87 persen pada tahun 2014; 5,96 persen pada tahun 2015, 6,11 persen pada tahun 2016, dan 5,83 persen pada tahun 2017. Jika dilihat pertumbuhannya, berturut-turut sebesar 1,58 persen (2013); 7,53 persen (2014); 3,63 persen (2015), 4,79 persen (2016), dan 1,01 persen (2017).

Produk Kekayaan Intelektual memiliki kontribusi masing-masing sebesar 2,43 persen (2013); 2,79 persen (2014); 2,70 persen (2015), 2,83 persen (2016), dan 2,63 persen (2017). Pertumbuhan Produk kekayaan intelektual pada tahun 2013 tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 16,54 persen, kemudian meningkat di tahun 2014 menjadi sebesar 21,38 persen. Pada tahun 2015 pertumbuhan produk kekayaan intelektual menurun cukup tajam mencapai 2,28 persen, kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 7,69 persen pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi perlambatan pertumbuhan produk kekayaan intelektual, yaitu tumbuh minus 3,83 persen.

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2013-2017, pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi namun masih tumbuh positif. Pertumbuhan PMTB pada tahun 2013 mencapai 5,01 persen; kemudian menurun menjadi sebesar 4,45 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pertumbuhan PMTB meningkat kembali mencapai 5,01 persen, kemudian menurun kembali menjadi sebesar 4,47 persen pada tahun 2016. Pertumbuhan pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,15 persen, merupakan pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu 2013-2017.

3.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **"persediaan"** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Khusus di sektor perdagangan, inventori bisa berupa persediaan barang dagangan. Perubahan yang dimaksud, bisa dalam bentuk penambahan (bertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Barang persediaan, bisa berupa produk jadi, produk setengah jadi, bahan baku, bahan penolong maupun barang strategis pemerintah, yang belum terserap oleh pasar. Barang inventori di antaranya meliputi karet kering, biji sawit, coklat, kopi, teh, kulit kina, tembakau, rami, minyak mentah, kondensat, gas alam, elpiji, batu bara (andesit dan antrasit), aspal, bauksit, granit, emas dan sebagainya.

Dari sisi penghitungan, maka komponen perubahan inventori merupakan satu-satunya komponen yang hasilnya dapat berupa angka negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya. Hal pokok

yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi dalam PDB yang mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	178.090,5	220.230,6	144.178,9	158.867,1	174.517,9
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	124.453,6	163.582,6	112.847,9	133.400,1	115.396,4
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	1,87	2,08	1,25	1,28	1,28
Struktur Inventori ¹⁵					
Total inventori (%)					
- Hasil Perkebunan	1,49	8,20	16,07	11,20	-22,96
- Hasil Pertambangan	4,36	27,37	-6,34	-3,99	16,78
- Hasil Industri	143,09	44,14	150,49	10,57	11,31
- Lainnya	-48,94	20,29	-60,22	82,23	94,87

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Go Public Tahun 2015

Pada tahun 2013 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 178.090,5 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2014 perubahan inventori meningkat sebesar 220.230,6 miliar rupiah. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga mencapai 144.178,9 miliar rupiah. Pada tahun 2016-2017 perubahan inventori mengalami peningkatan kembali yaitu hingga mencapai 158.867,1 miliar rupiah dan 174.517,9 miliar rupiah. Jika dilihat proporsinya, perubahan inventori hanya memiliki peran sebesar 1-2 persen terhadap PDB Indonesia, yaitu 1,87 persen (2013); 2,08 persen (2014); 1,25 persen (2015); 1,28 persen (2016); dan 1,28 persen (2017).

3.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, karena

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHB)

dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekspor mencakup pembelian barang dan jasa oleh penduduk negara lain/luar negeri (non residen) atas produk ekonomi domestik, yang secara umum mencakup perdagangan barang, angkutan dan komunikasi, serta asuransi. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Secara total, nilai ekspor barang dan jasa pada tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 2.283.776,7 miliar rupiah dan 2.501.424,8 miliar rupiah, selanjutnya pada tahun 2015 nilai ekspor barang dan jasa menurun menjadi sebesar 2.438.992,7 miliar rupiah, dan 2.372.293,3 miliar rupiah pada tahun 2016. Pada tahun 2017, ekspor barang dan jasa meningkat kembali menjadi sebesar 2.768.148,8 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor adh berlaku, nilai ekspor barang dan jasa adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu sebesar 2.026.113,7 miliar rupiah pada tahun 2013 dan 2.047.887,1 miliar rupiah pada tahun 2014. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar 2.004.467,0 miliar rupiah dan 1.973.040,4 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2017 ekspor barang dan jasa adh konstan mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.152.404,1 miliar rupiah.

Jika dilihat proporsinya terhadap PDB selama kurun waktu 2013 s.d 2016, proporsi ekspor barang dan jasa terhadap PDB justru cenderung menurun dari 23,92 persen (2013); 23,67 persen (2014); 21,16 persen (2015); dan 19,12 persen (2016). Namun, pada tahun 2017 proporsi ekspor barang dan jasa terhadap PDB meningkat menjadi sebesar 20,37 persen.

**Tabel 13. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.283.776,7	2.501.424,8	2.438.992,7	2.372.293,3	2.768.148,8
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.026.113,7	2.047.887,1	2.004.467,0	1.973.040,4	2.152.404,1
Proporsi terhadap PDB					
(% - ADHB)	23,92	23,67	21,16	19,12	20,37
Struktur Ekspor Barang dan Jasa ¹⁶					
a. Barang	2.044.358,1	2.223.342,0	2.131.563,4	2.040.317,2	2.403.487,9
Persentase (%)	89,52	88,88	87,40	86,01	86,83
a.1. Barang Non-migas	1.703.498,9	1.869.262,1	1.884.921,2	1.866.720,9	2.193.877,2
Persentase (%)	74,59	74,73	77,28	78,69	79,25
a.b. Barang migas	340.859,2	354.079,8	246.642,2	173.596,3	209.610,7
Persentase (%)	14,93	14,16	10,11	7,32	7,57
b. Jasa	239.418,5	278.082,9	307.429,3	331.976,1	364.660,9
Persentase (%)	10,48	11,12	12,60	13,99	13,17
Total ekspor	2.283.776,7	2.501.424,8	2.438.992,7	2.372.293,3	2.768.148,8
Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁷					
a. Barang	3,81	0,80	(2,47)	(2,39)	9,43
a.1. Barang Non-migas	7,14	1,46	(4,33)	(1,97)	10,65
a.b. Barang migas	(13,64)	(3,50)	10,25	(4,92)	1,98
b. Jasa	7,57	3,63	1,06	5,60	6,39
Total ekspor	4,17	1,07	(2,12)	(1,57)	9,09

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Menurut komposisi ekspor dalam bentuk barang atau jasa, maka sebagian besar ekspor Indonesia berupa barang, sementara nilai ekspor dalam bentuk jasa memiliki peran yang tidak terlalu besar. Ekspor barang memiliki proporsi di masing-masing tahun sebesar 89,52 persen (2013); 88,88 persen (2014); 87,40 persen (2015); 86,01 persen (2016); dan 86,83 persen (2017). Sedangkan ekspor jasa memiliki peranan terendah terhadap total ekspor barang dan jasa, masing-masing tahun sebesar 10,48 persen (2013); 11,12 persen (2014); 12,60 persen (2015); 13,99 persen (2016); dan 13,17 persen (2017).

16 Diturunkan dari PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

17 Diturunkan dari perhitungan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010)

Pertumbuhan riil total ekspor pada tahun 2013 sebesar 4,17 persen, kemudian pada tahun 2014 pertumbuhan ekspor barang dan jasa mulai melambat yaitu sebesar 1,07 persen (2014) selanjutnya tumbuh minus 2,12 persen (2015) dan minus 1,57 persen (2016). Pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 9,09 persen.

3.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor barang dan jasa, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. Oleh karena itu untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan, yaitu dengan cara mengurangi nilai PDB menurut pengeluaran dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDB menurut lapangan usaha.

Berbeda dengan komponen ekspor barang dan jasa, transaksi impor barang dan jasa menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari nonresiden. Karena impor bukan merupakan produk yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi domestik Indonesia, oleh karenanya impor harus dikeluarkan dari penghitungan PDB. Dengan demikian, maka PDB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain (*rest of the world*). Selain dibedakan menurut barang dan jasa, pada tingkat yang agak rinci, impor barang dibedakan menurut 2 kategori yaitu : barang nonmigas dan barang migas. Pada komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa

secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Indonesia di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Secara nominal, nilai impor barang dan jasa pada tahun 2013 mencapai 2.359.212,1 miliar rupiah dan pada tahun 2014 mencapai 2.580.508,0 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan pada impor barang dan jasa yaitu sebesar 2.394.879,3 miliar rupiah dan 2.272.665,8 miliar rupiah. Kemudian impor barang dan jasa meningkat kembali pada tahun 2017 mencapai 2.604.350,1 miliar rupiah.

Jika dilihat secara riil maka nilai impor barang dan jasa selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang sama, yaitu pada tahun 2013 mencapai 1.945.867,3 miliar rupiah dan pada tahun 2014 mencapai 1.987.113,9 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan pada impor barang dan jasa yaitu sebesar 1.862.939,0 miliar rupiah dan 1.817.369,5 miliar rupiah. Kemudian impor barang dan jasa meningkat kembali pada tahun 2017 mencapai 1.963.783,7 miliar rupiah.

Begitupula dengan proporsinya, pada tahun 2013 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 24,71 persen. Selanjutnya, pada tahun 2014 s.d 2016 proporsi impor barang dan jasa menurun yaitu sebesar 24,41 persen; 20,78 persen; dan 18,32 persen. Pada tahun 2017 kontribusi impor barang dan jasa terhadap perekonomian Indonesia meningkat menjadi sebesar 19,17 persen.

Di sisi lain, secara riil nilai impor barang dan jasa mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,86 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 2,12 persen pada tahun 2014. Kemudian terjadi perlambatan cukup tajam pada tahun 2015 yaitu tumbuh minus 6,25 persen dan minus 2,45 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8,06 persen.

**Tabel 14. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor Barang dan Jasa					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.359.212,1	2.580.508,0	2.394.879,3	2.270.665,8	2.604.350,1
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.945.867,3	1.987.113,9	1.862.939,0	1.817.369,5	1.963.783,7
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	24,71	24,41	20,78	18,32	19,17
Struktur Impor ¹⁸					
a. Barang	2.012.939,9	2.177.253,0	1.963.460,3	1.851.967,2	2.154.333,6
Persentase (%)	85,32	84,37	81,99	81,49	82,72
a.1. Barang Non-migas	1.523.386,0	1.652.229,2	1.625.135,5	1.596.402,2	1.820.794,9
Persentase (%)	64,57	64,03	67,86	70,24	69,91
a.b. Barang migas	489.553,9	525.023,8	338.324,8	255.565,0	333.538,7
Persentase (%)	20,75	20,35	14,13	11,25	12,81
b. Jasa	346.272,2	403.255,1	431.419,0	420.698,5	450.016,5
Persentase (%)	14,68	15,63	18,01	18,51	17,28
Total Impor	2.359.212,1	2.580.508,0	2.394.879,3	2.272.665,8	2.604.350,1
Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁹					
a. Barang	2,03	2,37	(6,35)	(2,37)	8,73
a.1. Barang Non-migas	0,90	2,96	(7,68)	(2,72)	9,55
a.b. Barang migas	6,90	(0,09)	(0,75)	(0,99)	5,57
b. Jasa	0,90	0,66	(5,63)	(2,90)	3,98
Total Impor	1,86	2,12	(6,25)	(2,45)	8,06

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Sebagian besar produk impor berbentuk barang nonmigas memiliki porsi rata-rata sekitar 64-70 persen, diikuti impor jasa sekitar 15-19 persen dan impor barang migas 11-21 persen. Secara struktur, Impor dalam bentuk barang cenderung menurun dari sebesar 85,32 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 81,49 persen pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 meningkat kembali 82,72 persen. Sedangkan impor jasa mempunyai pola struktur cenderung meningkat dimana pada tahun 2013 porsi impor jasa sebesar 14,68 persen menjadi 18,51 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017, porsi impor jasa sedikit menurun yaitu sebesar 17,28 persen.

18 Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHB)

19 Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHK 2010)

BAB IV

BEBERAPA AGREGAT PDB DAN PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA TAHUN 2013 - 2017

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDB. Meskipun secara total mempunyai nilai yang sama, namun PDB yang diukur melalui pendekatan lapangan usaha atau pengeluaran mempunyai dua dimensi analisis yang berbeda. Secara garis besar, paling tidak dua dimensi itu mampu untuk menggambarkan tentang bagaimana nilai tambah produk diciptakan dan siapa pengguna akhir produk tersebut. Dalam publikasi ini, beberapa rasio (perbandingan relatif) juga akan disajikan guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

Dalam menghasilkan berbagai produk barang dan jasa, maka di satu sisi akan menciptakan nilai tambah, sementara di sisi lain nilai tambah tersebut akan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah rumah tangga, LNPRT, perusahaan, dan pemerintah. Berdasarkan proses pembentukan dan pemanfaatan nilai tambah ini, dapat dipelajari lebih jauh tentang sumber-sumber pendapatan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat diperhitungkan besaran pendapatan potensial yang akan diterima oleh masyarakat atau yang disebut sebagai **pendapatan nasional**.

4.1 PDB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan (konsep bruto). PDB dapat digunakan sebagai **ukuran produktivitas**, karena

menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui pendekatan nilai tambah. Proses tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan dukungan berbagai faktor produksi serta sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian, maka nilai tambah yang sebagian besar menggambarkan balas jasa (kompensasi atas) faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal (kapital) dan keahlian (kewirausahaan), merupakan inti dari analisis PDB di sini. Di sisi yang lain, PDB menurut pengeluaran atau permintaan akhir menjelaskan tentang aspek konsumsi dan akumulasi, bukan aspek produksi.

Dari series data PDB pengeluaran akan diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDB per kapita, yang selama ini digunakan sebagai proksi dari pola dan perkembangan **distribusi pendapatan** di dalam masyarakat.

**Tabel 15. Produk Domestik Bruto dan PDB Per Kapita
Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	9.546.134,0	10.569.705,3	11.526.332,8	12.406.774,1	13.588.797,3
- ADHK 2010	8.156.497,8	8.564.866,6	8.982.517,1	9.434.632,3	9.912.749,3
PDB per kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	38.365,9	41.915,8	45.119,6	47.957,2	51.887,2
- ADHK 2010	32.781,0	33.965,4	35.161,9	36.468,7	37.850,7
Perkembangan					
PDB per kapita ADHB	9,29	9,25	7,64	6,29	8,19
Pertumbuhan					
PDB per kapita ADHK 2010	4,12	3,61	3,52	3,72	3,79
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	248.818	252.165	255.462	258.705	261.891

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

PDB per kapita Indonesia menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perbandingan kenaikan PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita atas dasar harga berlaku (*current price*), secara kumulatif meningkat mulai tahun 2013, dari sebesar 38.365,9 ribu rupiah menjadi 51.887,2 ribu rupiah di tahun 2017. Di mana pada periode tahun 2014 s.d 2016 masing masing tahun meningkat menjadi 41.915,8 ribu rupiah, 45.119,6 ribu rupiah dan 47.957,2 ribu rupiah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDB atau nilai tambah sebesar nilai dimaksud pada masing-masing tahun.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara riil melambat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan PDB per kapita ini berawal dengan besaran 4,12 persen (2013), 3,61 persen (2014), 3,52 persen (2015), 3,72 persen (2016) dan menjadi 3,79 persen (2017). Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,3 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut, tidak saja terjadi secara riil tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel

Pendapatan nasional menggambarkan tentang pendapatan potensial yang diterima oleh seluruh masyarakat sesuai sumbernya, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kenyataannya pendapatan yang dihasilkan di satu wilayah belum tentu sepenuhnya diterima, digunakan atau dinikmati oleh masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut, karena kemungkinan ada sebagian yang mengalir ke luar wilayah/negara. Sebaliknya, ada pula pendapatan yang masuk ke wilayah tersebut dari wilayah lain. Oleh karena itu, konsep pendapatan nasional menjelaskan tentang

pendapatan yang diterima oleh masyarakat (residen) dari seluruh balas jasa faktor produksi yang diterima, baik yang berasal dari aktivitas ekonomi domestik maupun dari luar negeri dikurangi oleh pembayaran atas pendapatan masyarakat nonresiden.

Pendapatan nasional yang merupakan refleksi ukuran kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat, menggambarkan berbagai hal yang dicapai secara nasional yang dinyatakan dalam satuan moneter, pada kurun waktu tertentu (*current condition*). Ukuran keberhasilan tersebut digambarkan melalui kemampuan dalam menghasilkan berbagai produk atau barang dan jasa, menciptakan pendapatan, mengkonsumsi, serta menambah aset yang dimiliki oleh masyarakat pada kurun waktu tertentu. Karena sistem ekonomi negara bersifat terbuka, maka terjadi interaksi dan transaksi dengan luar negeri, yang menyebabkan terjadi aliran pendapatan masuk maupun keluar (*factorial income, net*).

Pendapatan nasional diperoleh dari PDB ditambah dengan selisih antara pendapatan faktor produksi yang diterima dari dan yang dibayarkan ke luar negeri. Pendapatan faktor produksi ini merupakan perolehan pendapatan atau pembayaran yang diwujudkan dalam bentuk balas jasa faktor produksi tenaga kerja (seperti upah dan gaji) dan bukan tenaga kerja (bunga, deviden, royalti, serta kompensasi atas pemilikan faktor produksi lainnya). Pendapatan tersebut merupakan sumber pembiayaan hidup (konsumsi) masyarakat. Apabila produk ekonomi yang dihasilkan tersebut dikaitkan dengan pola dan perilaku konsumsi masyarakat, maka angka pendapatan nasional dapat digunakan sebagai proksi atas ukuran kemakmuran.

Langkah menghitung pendapatan nasional²⁰ adalah dengan mengurangi PDB (nilai tambah bruto)²¹ dengan penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Nilai PDB dikurangi penyusutan disebut sebagai Produk Domestik Neto (PDN), kemudian apabila dikurangi dengan pajak tidak langsung (neto) disebut sebagai PDN atas dasar biaya faktor (*at factor cost*). Dengan demikian maka PDN atas dasar biaya faktor ini identik dengan balas jasa faktor produksi yang diciptakan di dalam wilayah ekonomi domestik (pendapatan domestik). Parameter itu bila diperhitungkan dengan pendapatan faktor yang diterima, dan dikurangi dengan yang dibayarkan ke luar negeri akan sama dengan **pendapatan nasional**.

Dalam kenyataan, pendapatan nasional belum bisa menggambarkan pendapatan potensial yang dapat diterima oleh masyarakat, masih ada penggunaan lain yang harus diperhitungkan, yaitu transfer berjalan (*current transfer*). pendapatan nasional ditambah dengan transfer berjalan (neto) akan sama dengan **pendapatan disposabel** (*disposable income*). Untuk itu, pendapatan disposabel menggambarkan maksimum pendapatan yang tersedia, yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membiayai konsumsi, atau untuk meningkatkan kekayaannya.

Dilihat secara umum, selama ini pendapatan nasional nilainya selalu lebih kecil dari nilai nominal PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain karena dideduksi oleh pajak tidak langsung (neto) dan penyusutan, pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri jauh lebih kecil dari pada yang dibayarkan ke luar negeri, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan ekonomi domestik. Mengalirnya pendapatan faktor produksi ke luar negeri disebabkan oleh ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap faktor

²⁰ Mengacu pada konsep SNA

²¹ Atas dasar harga pasar

produksi yang dimiliki oleh negara lain. Namun apabila diperhitungkan transfer maka penerimaan transfer Indonesia selalu dalam kondisi positif, dalam arti transfer yang diterima dari luar negeri lebih tinggi dari pada yang dibayarkan ke luar negeri. Pendapatan nasional dan pendapatan disposabel ini merupakan ukuran yang bersifat universal dan digunakan sebagai indikator perbandingan kemakmuran antar negara.

PDB adh berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, diawali dengan nilai sebesar 9.546.134,0 miliar rupiah (2013), 10.569.705,3 miliar rupiah (2014), 11.526.332,8 miliar rupiah (2015), 12.406.774,1 miliar rupiah (2016) dan mencapai 13.588.797,3 miliar rupiah pada tahun 2017.

Nilai penyusutan juga cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembentukan modal pada berbagai lapangan usaha, masing-masing dengan nilai 1.766.892,0 miliar rupiah (2013), 1.970.519,4 miliar rupiah (2014), 2.129.438,2 miliar rupiah (2015), 2.035.689,4 miliar rupiah (2016) dan 2.430.901,3 miliar rupiah (2017). Demikian juga dengan pajak tidak langsung neto atau pajak yang dibayar dikurangi subsidi yang diterima oleh masyarakat dalam beberapa tahun meningkat. Pada tahun 2013 pajak tidak langsung neto sebesar 305.357,3 miliar rupiah meningkat menjadi 332.860,6 miliar rupiah di tahun 2014. Demikian pula pada tahun-tahun berikutnya pajak tak langsung neto mengalami peningkatan menjadi 594.970,8 miliar rupiah (2015), 539.936,2 miliar rupiah (2016) dan 678.054,9 miliar rupiah (2017).

**Tabel 16. PDB, Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Nasional Per Kapita
Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDB (ADHB) (Miliar Rp)	9.546.134,0	10.569.705,3	11.526.332,8	12.406.774,1	13.588.797,3
Minus :					
Penyusutan	1.766.892,0	1.970.519,4	2.129.438,2	2.035.689,4	2.430.901,3
Minus :					
Pajak tidak langsung (neto) ²²	305.357,3	332.860,6	594.970,8	539.936,2	678.054,9
Plus :					
Pendapatan atas faktor produksi dari LN (neto) ²³	-285.326,2	-354.393,1	-382.339,8	-397.120,2	-429.642,8
Pendapatan Nasional (miliar Rp)	7.188.558,5	7.911.932,2	8.419.584,0	9.434.028,4	10.050.198,3
Plus					
Penerimaan Transfer ²⁴ dari LN (neto) ²⁵	43.716,8	61.949,2	73.687,3	59.336,5	60.197,5
Pendapatan Disposabel Nasional (Miliar Rp)	7.232.275,3	7.973.881,4	8.493.271,3	9.493.364,9	10.110.395,8
Per kapita (ribu rupiah)					
- PDB	38.365,9	41.915,8	45.119,6	47.957,2	51.887,2
- Pendapatan Nasional	28.890,8	31.376,0	32.958,3	36.466,4	38.375,5
- Pendapatan Disposabel	29.066,5	31.621,7	33.246,7	36.695,7	38.605,4
Kurs 1 US \$ = Rp	10.463,2	11.868,0	13.377,0	13.302,8	13.384,2
Per kapita (US \$)					
- PDB	3.666,7	3.531,8	3.372,9	3.605,0	3.876,8
- Pendapatan Nasional	2.761,2	2.643,7	2.463,8	2.741,3	2.867,2
- Pendapatan Disposabel	2.778,0	2.664,4	2.485,4	2.758,5	2.884,4
Jumlah penduduk (000 org) ²⁶	248.818	252.165	255.462	258.705	261.891

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Nilai **pendapatan nasional** pada masing-masing tahun sebesar 7.188.558,5 miliar rupiah pada tahun 2013, 7.911.932,2 miliar rupiah pada tahun 2014, 8.419.584,0 miliar rupiah pada tahun 2015, 9.434.028,4 miliar rupiah pada tahun 2016 dan mencapai 10.050.198,3 miliar rupiah pada tahun 2017. Pendapatan nasional itu, apabila dikoreksi

22 Pajak tidak langsung minus subsidi

23 Yang diterima dikurangi yang dibayarkan

24 Transfer berjalan (current transfer)

25 Yang diterima dikurangi yang dibayarkan

26 Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 (Pertengahan tahun/Juni)

dengan penerimaan transfer dari luar negeri akan diperoleh pendapatan disposabel Nasional. Karena transfer yang diterima dari luar negeri selalu lebih besar dari transfer yang dibayarkan ke luar negeri (dengan posisi selalu positif atau bertambah), maka menyebabkan adanya aliran devisa masuk dari transaksi tersebut. Penerimaan transfer dari luar negeri pada tahun 2013 sebesar 43.716,8 miliar rupiah meningkat menjadi 61.949,2 miliar rupiah pada tahun 2014, 73.687,3 miliar rupiah pada tahun 2015, 59.336,5 miliar rupiah pada tahun 2016 dan mencapai 60.197,5 miliar rupiah pada tahun 2017.

Pendapatan disposabel nasional yang secara umum nilainya di atas pendapatan nasional, juga cenderung semakin meningkat dengan besaran masing-masing tahun adalah 7.232.275,3 miliar rupiah pada tahun 2013, 7.973.881,4 miliar rupiah pada tahun 2014, 8.493.271,3 miliar rupiah pada tahun 2015, 9.493.364,9 miliar rupiah pada tahun 2016 dan 10.110.395,8 miliar rupiah pada tahun 2017. Ukuran per kapita, baik yang menyangkut PDB per kapita, pendapatan nasional per kapita serta pendapatan disposabel per kapita yang dinyatakan dalam satu satuan rupiah menunjukkan peningkatan. Dalam rupiah, perkembangan rata-rata PDB per kapita, pendapatan nasional per kapita serta pendapatan disposabel per kapita setiap tahun juga menunjukkan peningkatan secara optimal. Dilihat dari titik penghujung tahun (2013 dan 2017), PDB per kapita meningkat dari sebesar 38.365,9 ribu rupiah (2013) menjadi 51.887,2 ribu rupiah (2017). Kemudian pendapatan nasional per kapita dari sebesar 28.890,8 ribu rupiah (2013) meningkat menjadi sebesar 38.375,5 ribu rupiah (2017). Sedangkan pendapatan disposabel per kapita juga meningkat dari 29.066,5 ribu rupiah (2013) menjadi 38.605,4 ribu rupiah (2017).

Rata-rata per kapita dalam US\$ cenderung meningkat, PDB per kapita dari 3.666,7 US\$ pada tahun 2013 menjadi 3.876,8 US\$ pada tahun 2017, pendapatan nasional per kapita dari 2.761,2 US\$ pada tahun 2013 menjadi 2.867,2 US\$ tahun 2017 dan pendapatan disposabel dari 2.778,0 US\$ pada tahun 2013 menjadi 2.884,4 US\$ di tahun 2017.

4.3. Kecenderungan Rata-rata untuk Mengkonsumsi dan Menabung / *Average*

Propensity to Consume & Average Propensity to Save

Indikator ini menjelaskan kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi (*Average Propensity to Consume/APC*) dan keinginan untuk menabung (*Average Propensity to Save/APS*), yang dinyatakan dalam satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan, apabila pendapatan meningkat, tetapi APC menurun, maka APS akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Rasio yang digunakan merupakan perbandingan nilai antara bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan. Nilai APC dan APS dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$APS = \frac{S}{Y_d}$$

$$APC = \frac{C}{Y_d}$$

Di mana C = Tingkat Konsumsi, S = Tingkat Tabungan, dan Y_d = Pendapatan disposabel.

Perlu diketahui pula bahwa $APC + APS = 1$

**Tabel 17. Average Propensity to Consume (APC) dan Average Propensity to Save (APS)
Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Disposabel Nasional (Y_d) (Miliar Rp)	7.232.275,3	7.973.881,4	8.493.271,3	9.493.364,9	10.110.395,8
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	5.321.087,6	5.915.194,2	6.490.929,7	7.024.996,8	7.626.985,6
Total Konsumsi LNPRT (ADHB) (Miliar Rp)	103.929,0	124.242,0	130.950,6	144.499,4	160.569,5
Total Konsumsi Pemerintah (ADHB) (Miliar Rp)	908.574,3	996.197,4	1.123.749,9	1.183.640,3	1.236.869,0
Total Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)	6.333.590,9	7.035.633,7	7.745.630,1	8.353.136,5	9.024.424,2
APC	0,88	0,88	0,91	0,88	0,89
Tabungan (Miliar Rp)	898.684,4	938.247,8	747.641,1	1.140.228,4	1.085.971,7
APS	0,12	0,12	0,09	0,12	0,11

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Dari tabel di atas pada tahun 2013, didapat APC sebesar 0,88 dan APS sebesar 0,12 ini berarti bahwa rata-rata kecenderungan untuk mengkonsumsi adalah sebesar 88 persen dan rata-rata kecenderungan untuk menabung sebesar 12 persen. Pola yang sama masih terjadi pada tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata kecenderungan mengkonsumsi masih sangat tinggi dari rata-rata kecenderungan untuk menabung.

4.4. Perbandingan Pengeluaran PDB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDB Indonesia (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	5.321.087,6	5.915.194,2	6.490.929,7	7.024.996,8	7.626.985,6
Total Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.283.776,7	2.501.424,8	2.438.992,7	2.372.293,3	2.768.148,8
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	2,33	2,36	2,66	2,96	2,76

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2,33 kali dari yang diekspor di tahun 2013, di tahun-tahun berikutnya rasio masing-masing sebesar 2,36 kali pada tahun 2014, 2,66 kali pada tahun 2015, dan 2,96 kali pada tahun 2016 serta 2,76 kali pada tahun 2017. Ini berarti, sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor barang dan jasa cenderung meningkat selama rentang tahun 2013-2017. Hal tersebut menjelaskan bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan atau sebaliknya nilai ekspor semakin menurun. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.5 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap).

Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	5.321.087,6	5.915.194,2	6.490.929,7	7.024.996,8	7.626.985,6
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	3.051.496,2	3.436.923,7	3.782.011,9	4.040.204,6	4.370.555,8
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,74	1,72	1,72	1,74	1,75

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung stabil, dari sebesar 1,74 pada tahun 2013 menjadi 1,75 pada tahun 2017. Pada tahun 2014 dan 2015 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB mengalami penurunan dari tahun 2013 menjadi 1,72. Pada tahun pada tahun 2016 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB meningkat kembali menjadi 1,74 dan meningkat kembali menjadi 1,75 pada tahun 2017. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB tahun 2014 dan 2015 merupakan rasio terendah selama 5 tahun terakhir karena pertumbuhan PMTB yang lebih cepat.

4.6. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga (termasuk LNPR) dan pemerintah yang meskipun mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga, LNPRT dan pemerintah (lebih dari 66 persen). Proporsi konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah terhadap PDB makin meningkat setiap tahunnya, namun kembali menurun di tahun 2017. Proporsinya berturut-turut sebesar 66,35 persen (2013); 66,56 persen (2014); 67,20 persen (2015); dan 67,33 persen (2016) serta 66,41 persen (2017). Produk yang tidak digunakan untuk konsumsi akhir (digunakan sebagai PMTB serta ekspor barang dan jasa) masih lebih rendah dibandingkan dengan produk yang digunakan untuk konsumsi akhir.

**Tabel 20. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDB
Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
(Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	5.321.087,6	5.915.194,2	6.490.929,7	7.024.996,8	7.626.985,6
b. LNPRT	103.929,0	124.242,0	130.950,6	144.499,4	160.569,5
c. Pemerintah	908.574,3	996.197,4	1.123.749,9	1.183.640,3	1.236.869,0
Jumlah	6.333.590,9	7.035.633,7	7.745.630,1	8.353.136,5	9.024.424,2
PDB (ADHB)					
(Miliar Rp)					
	9.546.134,0	10.569.705,3	11.526.332,8	12.406.774,1	13.588.797,3
Proporsi	66,35	66,56	67,20	67,33	66,41

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

4.7 Perbandingan Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB

Ekspor Barang dan Jasa merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor pasti menggunakan kapital (PMTB), sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor barang dan jasa terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor barang dan jasa dengan nilai produk yang menjadi PMTB (kapital).

Pada periode tahun 2013 s.d 2017, nilai ekspor barang dan jasa lebih rendah dari PMTB sebagaimana digambarkan di atas. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor barang dan jasa) disyaratkan tersedia sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Besaran rasio masing-masing tahun adalah 0,75 (2013); 0,73 (2014); 0,64 (2015) dan 0,59 (2016) serta 0,63 (2017).

**Tabel 21. Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB (ADHB)
Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.283.776,7	2.501.424,8	2.438.992,7	2.372.293,3	2.768.148,8
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	3.051.496,2	3.436.923,7	3.782.011,9	4.040.204,6	4.370.555,8
Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB	0,75	0,73	0,64	0,59	0,63

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

4.8. Perbandingan PDB terhadap Impor Barang dan Jasa

Memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Besar kecilnya ketergantungan ditunjukkan melalui rasio, apabila rasionya kecil berarti ketergantungan semakin tinggi, sebaliknya apabila rasionya besar berarti ketergantungan terhadap produk impor tidak terlalu tinggi.

Rasio PDB terhadap impor barang dan jasa menunjukkan peningkatan dari 4,05 di tahun 2013, 4,10 di tahun 2014, 4,81 di tahun 2015, dan 5,46 di tahun 2016 serta 5,22 di tahun 2017. Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2016 (5,46) lebih disebabkan penurunan impor barang dan jasa dibandingkan impor barang dan jasa tahun

sebelumnya. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDB terhadap produk impor.

Tabel 22. Rasio PDB terhadap Impor Barang dan Jasa

Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDB (ADHB)					
(Miliar Rp)	9.546.134,0	10.569.705,3	11.526.332,8	12.406.774,1	13.588.797,3
Total Impor Barang dan Jasa (ADHB)					
(Miliar Rp)	2.359.212,1	2.580.508,0	2.394.879,3	2.272.665,8	2.604.350,1
Rasio PDB terhadap Impor Barang dan Jasa	4,05	4,10	4,81	5,46	5,22

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

4.9. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan

Berdasarkan seri data yang ada dapat ditunjukkan bahwa selama ini ekonomi Indonesia masih selalu ditopang oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan ini dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*) yang selalu menunjukkan ketidakseimbangan tersebut.

Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan

Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDB (ADHB)	9.546.134,0	10.569.705,3	11.526.332,8	12.406.774,1	13.588.797,3
(Miliar Rp)	(80,18)	(80,38)	(82,80)	(84,52)	(83,92)
Total nilai Impor ADHB	2.359.212,1	2.580.508,0	2.394.879,3	2.272.665,8	2.604.350,1
(Miliar Rp)	(19,82)	(19,62)	(17,20)	(15,48)	(16,08)
Total Permintaan Akhir ²⁷ (Miliar Rp)	11.905.346,1	13.150.213,3	13.921.212,1	14.679.439,9	16.193.147,4
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri, dengan rentang 15 s.d 20 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 80 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat dari 11.905.346,1 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 13.150.213,3 miliar rupiah pada tahun 2014. Pada tahun 2015 permintaan akhir masyarakat sudah mencapai 13.921.212,1 miliar rupiah, pada tahun 2016 mencapai 14.679.439,9 miliar rupiah dan 16.193.147,4 miliar rupiah di tahun 2017.

Di sisi lain penyediaan produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 9.546.134,0 miliar rupiah (2013); 10.569.705,3 miliar rupiah (2014), 11.526.332,8 miliar rupiah (2015) dan 12.406.774,1 miliar rupiah (2016) serta 13.588.797,3 miliar rupiah (2017). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 2.359.212,1 miliar rupiah (2013); 2.580.508,0 miliar rupiah (2014), 2.394.879,3 miliar rupiah (2015), 2.272.665,8 miliar rupiah (2016) dan 2.604.350,1 (2017).

4.10. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Transaksi valuta yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (nonresiden) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai **Ekspor Neto**, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, sebaliknya apabila nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor, maka yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran valuta

masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara di antaranya juga ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Rasio di sini tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2013-2017, posisi perdagangan barang dan jasa dengan luar negeri tidak selalu menunjukkan nilai positif atau neraca perdagangan barang dan jasa Indonesia tidak selalu dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk yang dalam konteks lain disebut sebagai **tabungan luar negeri**.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.283.776,7	2.501.424,8	2.438.992,7	2.372.293,3	2.768.148,8
Nilai Impor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.359.212,1	2.580.508,0	2.394.879,3	2.272.665,8	2.604.350,1
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	-75.435,5	-79.083,2	44.113,4	99.627,5	163.798,7
Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap Impor Barang dan Jasa	0,97	0,97	1,02	1,04	1,06

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Pada tahun 2013 sampai dengan 2014 posisi perdagangan barang dan jasa mengalami defisit sebesar minus 75.435,5 miliar rupiah dan minus 79.083,2 miliar rupiah. Sebaliknya pada tahun 2015 hingga 2017 terjadi surplus perdagangan sebesar 44.113,4 miliar rupiah 99.627,5 miliar rupiah serta 163.798,7 miliar rupiah. Sementara rasio ekspor barang dan jasa terhadap impor barang dan jasa cenderung meningkat dari tahun 2013 hingga 2017 yaitu 0,97 pada tahun 2013 dan tahun 2014, kemudian membaik pada tahun 2015 sebesar 1,02 dan 1,04 pada tahun 2016 serta 1,06 pada tahun 2017.

4.11. Rasio Perdagangan Internasional (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional, apakah didominasi oleh ekspor atau impor. Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor dikurangi impor dibagi dengan jumlah ekspor dan impor. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Artinya jika RPI berkisar antara minus 1 maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1 maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

**Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional
Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.283.776,7	2.501.424,8	2.438.992,7	2.372.293,3	2.768.148,8
Nilai Impor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.359.212,1	2.580.508,0	2.394.879,3	2.272.665,8	2.604.350,1
(X – M) (Miliar Rp)	-75.435,5	-79.083,2	44.113,4	99.627,5	163.798,7
(X + M) (Miliar Rp)	4.642.988,8	5.081.932,9	4.833.872,0	4.644.959,1	5.372.498,9
R P I	-0,02	-0,02	0,01	0,02	0,03

Keterangan : * sementara

** sangat sementara

Posisi ekspor barang dan jasa lebih rendah dari impor barang dan jasa pada tahun 2013-2014, namun pada tahun 2015 hingga 2017 posisi ekspor lebih tinggi dari impor. Nilai ekspor barang dan jasa pada tahun 2015 sebesar 2.438.992,7 miliar rupiah, lebih tinggi dari nilai impor barang dan jasa yaitu sebesar 2.394.879,3 miliar rupiah. Pada tahun 2016 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2.372.293,3 miliar rupiah lebih tinggi dari nilai impor barang dan jasa sebesar 2.272.665,8 miliar rupiah. Pada tahun 2017 nilai ekspor barang dan jasa mencapai 2.768.148,8 lebih tinggi dibandingkan impor barang dan jasa yang mencapai 2.604.350,1 miliar rupiah. Sebaliknya, pada periode 2013–2014 nilai ekspor barang dan jasa lebih rendah dari nilai impor barang dan jasa sehingga net ekspor menjadi negatif masing-masing sebesar minus 75.435,5 miliar rupiah dan minus 79.083,2 miliar rupiah.

Rasio Perdagangan Internasional Indonesia pada tahun 2015 hingga 2017 mengindikasikan bahwa perdagangan internasional Indonesia selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, meskipun dengan rasio yang cukup kecil yaitu kurang dari 0,1 sedangkan pada tahun 2013-2014 rasio perdagangan internasional Indonesia didominasi oleh impor karena rasio yang menunjukkan tanda minus.

4.12. Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri

Nilai tukar perdagangan luar negeri (*Term of Trade*) sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga barang ekspor maupun harga barang impor. Ada dua parameter yang dibahas yaitu Indeks Nilai Tukar (I_{NT}) dan Kapasitas Impor (K_M) yang masing-masing menjelaskan tentang daya beli dan kemampuan mengimpor berdasarkan nilai ekspor. Indeks nilai tukar diperoleh dengan cara membagi indeks implisit (harga) ekspor (II_X) dengan indeks implisit (harga) impor (II_M), sedangkan K_M diperoleh dengan cara membagi nilai ekspor adh Berlaku dengan indeks implisit impor.

**Tabel 26. Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri
Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.283.776,7	2.501.424,8	2.438.992,7	2.372.293,3	2.768.148,8
Nilai Impor Barang dan Jasa (ADHB) (Miliar Rp)	2.359.212,1	2.580.508,0	2.394.879,3	2.272.665,8	2.604.350,1
Indeks Implisit Ekspor Barang dan Jasa	112,7	122,1	121,7	120,2	128,6
Indeks Implisit Impor Barang dan Jasa	121,2	129,9	128,6	125,1	132,6
Indeks nilai tukar (I_{NT})	92,97	94,06	94,65	96,15	96,98
Kapasitas Impor	1.883.648,5	1.926.216,1	1.897.254,1	1.897.038,0	2.087.294,4

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Kemampuan mengimpor pada tahun 2013 dan 2014 adalah 1.883.648,5 miliar rupiah dan 1.926.216,1 miliar rupiah. Sedangkan kemampuan mengimpor pada tahun 2015 menurun menjadi 1.897.254,1 miliar rupiah, dan 1.897.038,0 miliar rupiah pada tahun 2016. Kemampuan mengimpor kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 2.087.294,4 miliar rupiah.

4.13. Rasio Pendapatan Nasional (PN) Terhadap PDB

Rasio Pendapatan Nasional (PN) terhadap PDB merupakan perbandingan antara PN yang dihasilkan terhadap PDB. Berbagai sektor produksi mengalokasikan balas jasa faktor produksi pada pemilik faktor produksi yang sebagian besar dimiliki oleh rumah tangga. Untuk mendapatkan gambaran pendapatan yang secara potensial akan diterima masyarakat, maka unsur yang bukan merupakan faktor pendapatan harus dikeluarkan dari penghitungan, seperti penyusutan dan pajak tidak langsung (neto), yang hasilnya kemudian disebut sebagai pendapatan domestik. Kemudian untuk menghitung pendapatan nasional, maka pendapatan domestik tersebut harus ditambah dengan

pendapatan faktor yang masuk setelah dikurangi dengan pendapatan faktor yang keluar. Sementara itu, untuk mendapatkan pendapatan yang benar-benar diterima (atau siap dibelanjakan) maka pendapatan nasional tersebut harus ditambah dengan penerimaan transfer setelah dikurangi pembayaran transfer (khusus untuk transfer berjalan).

Data selanjutnya menunjukkan bahwa dari nilai tambah yang dihasilkan setiap tahun ada sebagian yang tidak diterima oleh masyarakat. Sebagian pendapatan faktor produksi lebih banyak yang dibayarkan ke luar negeri dari pada yang diterima dari luar negeri (posisi defisit). Sementara, penerimaan transfer dari luar negeri lebih besar dari transfer yang dibayarkan ke luar negeri (posisi surplus), sehingga menyebabkan adanya penambahan pendapatan masyarakat di wilayah domestik.

**Tabel 27. Proporsi Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Terhadap PDB
Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDB (Miliar Rp)	9.546.134,0	10.569.705,3	11.526.332,8	12.406.774,1	13.588.797,3
Pendapatan Nasional (PN) (Miliar Rp)	7.188.558,5	7.911.932,2	8.419.584,0	9.434.028,4	10.050.198,3
Rasio PN/PDB	75,30	74,85	73,05	76,04	73,96
Pendapatan Disposabel (PD) (Miliar Rp)	7.232.275,3	7.973.881,4	8.493.271,3	9.493.364,9	10.110.395,8
Rasio PD/PDB	75,76	75,44	73,69	76,52	74,40

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Pada tahun 2013, dari PDB yang dihasilkan sebesar 9.546.134,0 miliar rupiah sebesar 75,30 persen menjadi pendapatan nasional dan 75,76 persen menjadi pendapatan disposabel. Setelah tahun 2013, pendapatan nasional maupun pendapatan disposabel mengalami peningkatan secara nominal setiap tahunnya dengan porsi yang fluktuatif.

Pendapatan nasional secara nominal meningkat dari sebesar 7.188.558,5 miliar rupiah pada tahun 2013 meningkat menjadi 7.911.932,2 miliar rupiah, 8.419.584,0 miliar rupiah, 9.493.028,4 miliar rupiah, dan 10.050.198,3 miliar rupiah selama periode 2014 hingga 2017. Sedangkan jika dilihat porsi pendapatan nasional terhadap produk domestik bruto menurun dari sebesar 75,30 persen (2013) menjadi 74,85 persen (2014), 73,05 persen (2015) meningkat kembali menjadi 76,04 (2016). Pada tahun 2017 porsi pendapatan nasional terhadap produk domestik bruto kembali menurun menjadi 73,96 persen.

Nilai pendapatan disposabel juga meningkat setiap tahunnya dalam rentang waktu tahun 2013-2017. Masing-masing sebesar 7.232.275,3 miliar rupiah (2013), 7.973.881,4 miliar rupiah (2014), 8.493.271,3 miliar rupiah (2015), 9.493.364,9 miliar rupiah (2016) dan 10.110.395,8 miliar rupiah (2017). sebaliknya porsi pendapatan disposabel terhadap produk domestik bruto menurun setiap tahun pada rentang 2013-2015 masing-masing sebesar 75,76 persen (2013); 75,44 persen (2014), 73,69 persen (2015) kemudian meningkat menjadi 76,52 persen (2016) dan kembali turun menjadi 74,40 persen (2017).

4.14. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter nilai tambah.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

dimana :

I_t : PMTB tahun ke t

Y_t : Output tahun ke t

Y_{t-1} : Output tahun ke t-1

**Tabel 28. Incremental Capital Output Ratio
Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDB (ADHK) (miliar rupiah)	8.156.497,8	8.564.866,6	8.982.517,1	9.434.632,3	9.912.749,3
Perubahan (miliar rupiah)	429.414,4	408.368,8	417.650,5	452.115,2	478.117,0
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	2.654.375,0	2.772.470,8	2.911.356,0	3.041.586,6	3.228.747,5
ICOR	6,18	6,79	6,97	6,73	6,75

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR pada tahun 2013 sebesar 6,18 yang berarti bahwa untuk menaikkan 1 unit output diperlukan penambahan kapital sebesar 6,18 unit. Pada tahun berikutnya ICOR tercatat sebesar 6,79 (2014); 6,97 (2015); 6,73 (2016) dan 6,75 (2017).

<https://www.bps.go.id>

BAB V

SUMBER DATA DAN METODE PENGHITUNGAN

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan ukuran kinerja suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan *System of National Accounts* (SNA) yang berlaku secara internasional. SNA menyajikan aturan dan prinsip akuntansi secara umum yang wajib digunakan oleh seluruh negara dalam menyusun statistik neraca nasional. Namun dalam implementasinya, ada beberapa ketentuan yang harus disesuaikan karena masalah ketersediaan data dan sistem perstatistikan yang berlaku di negara masing-masing. Secara bertahap Indonesia telah melakukan penyesuaian yang dimaksud. SNA yang telah disesuaikan dengan kondisi perstatistikan yang ada di Indonesia disebut sebagai Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI).

Selama ini, penghitungan PDB didasarkan pada SNNI versi lama, yaitu SNNI yang didasarkan pada SNA 1968 dan SNA 1993. Sejalan dengan program perubahan tahun dasar PDB (dari tahun 2000 menjadi 2010) dan implementasi SNA 2008, penghitungan PDB menggunakan SNNI versi baru²⁸. Beberapa penyesuaian yang dilakukan BPS atas SNA 2008 tertuang dalam sistem baru ini. Penyesuaian tersebut bersifat menyeluruh mencakup konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, metode penghitungan, dan sumber data yang digunakan. SNNI versi baru itu disebut sebagai SNNI 2010.

PDB merupakan ukuran kinerja perekonomian tingkat nasional. Untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota ukuran ini disebut PDRB. Dengan menggunakan pedoman penyusunan yang sama (SNNI 2010), hasil penghitungan PDB dan PDRB akan konsisten.

²⁸ SNNI versi baru (SNNI 2010) menggunakan SNA 2008 sebagai dasar dalam menghitung statistik neraca nasional (PDB/PDRB dan neraca-neraca lainnya seperti neraca produksi, neraca penggunaan pendapatan, dan neraca modal)

Pada dasarnya seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (unit residen – rumah tangga, lembaga nonprofit, pemerintah, perusahaan - maupun unit nonresiden) harus dicatat secara konsisten dan sistematis dengan menggunakan standar aturan dan akuntansi yang berlaku secara umum. Khusus untuk penghitungan PDB/PDRB aturan dan akuntansi yang perlu diperhatikan adalah bahwa :

- Total suplai (produk domestik/impor) dengan total permintaan (antara dan akhir) untuk setiap industri harus sama;
- Total output dengan total input (input antara dan input primer) suatu industri harus sama;
- Total pendapatan yang tercipta dalam suatu perekonomian dengan input primer yang digunakan dalam aktivitas produksi, harus sama.

Ketiga aturan akuntansi tersebut di atas merupakan dasar di dalam penghitungan PDB baik dengan pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), maupun pendapatan (*income approach*).

Dari sisi yang lain, PDB menggambarkan seluruh output perekonomian suatu negara/wilayah selama kurun waktu tertentu. PDB diukur berdasarkan nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi dalam batas-batas teritori suatu negara atau wilayah pada kurun waktu satu tahun atau satu triwulan. Data PDB dalam konteks tersebut di atas akan berkorelasi positif dengan standar hidup penduduk, sehingga data PDB sering kali digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. PDB merupakan ukuran kinerja atau aktivitas ekonomi, maka bukan merupakan ukuran yang tepat untuk menggambarkan standar hidup atau kesejahteraan masyarakat. PDB sebagai ukuran standar hidup banyak dikritisi oleh berbagai pihak. Untuk itu banyak negara melakukan

langkah-langkah alternatif untuk meningkatkan kualitas data PDB agar lebih akomodatif terhadap pengukuran standar hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Series PDB/PDRB yang panjang dan konsisten juga merupakan data yang dibutuhkan oleh para pengguna khususnya para peneliti, statistisi, maupun para perencanaan pembangunan. Untuk itu upaya mengkonsistenkan data PDB dengan tahun dasar yang berbeda, maupun data PDB dengan tiga pendekatan yang berbeda perlu dilakukan. Proses konsistensi dan realibilitas series data PDB/PDRB tersebut dilakukan melalui proses *benchmarking* dan *rebasing*. Agar tetap terjaga konsistensinya, proses ini akan dilakukan oleh BPS secara berkesinambungan.

Proses *benchmarking*²⁹ dan *rebasing*³⁰ data PDB/PDRB di Indonesia termasuk salah satu perubahan yang diadopsi di dalam sistem penghitungan yang baru (SNNI 2010). Selama ini data PDB/PDRB didiseminasi dengan menggunakan tahun dasar dan pendekatan yang berbeda, sehingga perlu diselaraskan dengan menggunakan tahun dasar yang sama (tahun dasar 2010)³¹ di dalam suatu kerangka kerja yang baru dalam hal ini kerangka kerja SNNI 2010.

5.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Unit institusi dalam suatu perekonomian dapat dikelompokkan ke dalam lima sektor institusi, yaitu korporasi nonfinansial, korporasi finansial, pemerintahan umum, rumah tangga, dan LNPRT. Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen pengeluaran

²⁹ *Benchmarking* merupakan proses penetapan level PDB/PDRB, dengan menggunakan Tabel SUT sebagai *benchmark* (level dasar)

³⁰ *Rebasing* merupakan proses merubah tahun dasar PDB/PDRB lama (tahun 2000) dengan tahun dasar baru (tahun 2010)

³¹ Tahun dasar 2010 adalah tahun dasar baru, dan sistem penghitungan yang digunakan telah berbasis SNA 2008 (SNNI 2010)

konsumsi rumah tangga dalam PDB Pengeluaran. Di samping sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi bagi sektor institusi lainnya.

a. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau sekelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal, mengumpulkan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaannya, serta mengonsumsi barang dan jasa secara kolektif, utamanya makanan dan perumahan. Selain itu, anggota rumah tangga (ART) pada umumnya berhak mengklaim kekayaan kolektif rumah tangga. Konsep residen yang dimaksud adalah dimana anggota rumah tangga menetap/berniat menetap lebih dari 1 tahun dan dimana aktivitas ekonomi utamanya (*centre of economic interest*) berada.

Konsumsi akhir yang dimaksud adalah konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga mencakup:

- 1) Nilai barang dan jasa yang berasal dari pembelian;
- 2) Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari transaksi barter;
- 3) Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja sebagai bagian dari kompensasi tenaga kerja; dan
- 4) Perkiraan nilai barang dan jasa yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri.

Sementara itu, konsumsi akhir rumah tangga tidak mencakup:

- 1) Pengeluaran untuk mengadakan aset tetap dan barang-barang berharga;
- 2) Pengeluaran untuk Usaha Rumah Tangga (URT);

- 3) Perbaikan besar tempat tinggal, seperti rekonstruksi, renovasi, dan sebagainya;
- 4) Pembayaran pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh);
- 5) Pembayaran kredit, premi asuransi, dan dana pensiun; serta
- 6) Barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja untuk kegiatan operasional usaha dan bukan bagian dari kompensasi tenaga kerja.

PK-RT dicatat secara *accrual basis*. Konsumsi barang dicatat pada saat terjadi perubahan kepemilikan, sedangkan konsumsi jasa dicatat setelah jasa disalurkan dan dinikmati oleh rumah tangga. PK-RT dinilai dengan harga pembeli, termasuk pajak atas produk, dan biaya pengiriman. Berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga diklasifikasikan ke dalam 12 (dua belas) divisi COICOP (*Classification of Individual Consumption According to Purpose*), yaitu:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol;
2. Minuman beralkohol dan tembakau;
3. Pakaian dan alas kaki;
4. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya;
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin;
6. Kesehatan;
7. Transportasi;
8. Komunikasi;
9. Rekreasi dan kebudayaan;
10. Pendidikan;
11. Penyediaan makan minum dan akomodasi;
12. Barang dan jasa lainnya.

b. Sumber data dan Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk estimasi PK-RT adalah sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga menurut COICOP hasil *Supply and Use Table* (SUT) 2010 sebagai *benchmarking*;
- 2) Pengeluaran konsumsi per kapita hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
- 3) Proyeksi jumlah penduduk;
- 4) Pengeluaran konsumsi rumah tangga hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2012;
- 5) Data harga komoditas tertentu;
- 6) Data-data sekunder lainnya, termasuk data administratif Kementerian/Lembaga dan data asosiasi;
- 7) Indeks Harga Konsumen (IHK).

Dari berbagai sumber data di atas, PK-RT diestimasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran konsumsi per kapita menurut komoditas konsumsi Susenas dikalikan dengan proyeksi jumlah penduduk, sehingga diperoleh nilai estimasi awal PK-RT menurut komoditas konsumsi Susenas;
- 2) Bridging hasil estimasi awal PK-RT menurut komoditas konsumsi Susenas ke dalam COICOP hingga level subkelas (5 digit COICOP), sehingga diperoleh nilai estimasi awal PK-RT menurut COICOP;
- 3) Hasil estimasi awal PK-RT menurut COICOP selanjutnya dikoreksi dengan rasio PK-RT hasil SUT 2010, SBH 2012, dan data sekunder, sehingga diperoleh PK-RT atas dasar harga berlaku;

- 4) Untuk memperoleh PK-RT atas dasar harga konstan, PK-RT atas dasar harga berlaku dideflasikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang bersesuaian.

5.2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT)

Sektor lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga merupakan pelengkap dari sektor institusi yang ada di dalam suatu perekonomian. Munculnya sektor ini sebagai sektor tersendiri memberi gambaran atas seluruh proses ekonomi dan peranan yang dilakukan sektor institusi dalam perekonomian. Sektor institusi dalam total ekonomi dibedakan atas lima sektor, yaitu sektor korporasi nonfinansial, korporasi finansial, pemerintahan umum, rumah tangga dan LNPRT. Sektor LNPRT menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi.

a. Konsep dan Definisi

1. LNPRT (Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga)

LNPRT merupakan bagian dari keseluruhan Lembaga Nonprofit (LNP). Sesuai dengan masing-masing fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. LNPRT merupakan lembaga yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi bagi anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah³² Harga yang tidak berarti secara ekonomi adalah harga yang tidak punya pengaruh signifikan pada jumlah produsen yang ingin menyediakan barang dan jasa, serta pada jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen.

Tabel 2.2.1. Klasifikasi Jenis LNP menurut Sektor Institusi

	Jenis LNP	Sektor Kelembagaan
1	LNP yang menyediakan jasa ke korporasi (perusahaan)	Korporasi
2	LNP yang dikontrol pemerintah dan menyediakan jasa (individu atau kolektif) berbasis nonpasar	Pemerintahan
3	LNP yang menyediakan barang dan jasa ke rumah tangga dengan harga yang signifikan secara ekonomi	Korporasi
4	LNP yang menyediakan jasa ke rumah tangga secara gratis atau dengan harga yang tak-berarti secara ekonomi	Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT)
5	LNP yang menyediakan jasa kolektif secara gratis atau dengan harga yang tidak berarti secara ekonomi	Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT)

Pedoman untuk mengidentifikasi apakah suatu harga berarti secara ekonomi adalah jika harga itu menutup setengah biaya produksi. Jika tidak, harga ini tidak berarti secara ekonomi (berbasis *nonmarket*). Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

i. LNP yang menyediakan jasa bagi korporasi

LNP kelompok ini mencakup LNP yang menyediakan jasa bagi korporasi dengan memungut biaya atau iuran untuk biaya penyediaan jasanya. Tingkat biaya atau harga ini termasuk dalam kriteria harga yang berarti secara ekonomi (*economically significant price*). Jasa layanan ini dijual pada anggota (korporasi) dan diperlakukan sebagai konsumsi antara di korporasi tersebut. LNP semacam ini umumnya berbentuk asosiasi yang menyediakan jasa khusus bagi anggota. Sebagian besar LNP didirikan oleh korporasi dan dirancang untuk kepentingan promosi. Contoh: kamar dagang, asosiasi produsen pertanian, manufaktur, atau perdagangan, organisasi pengusaha penelitian dan pengujian laboratorium atau lembaga lain yang terlibat dalam aktivitas untuk kepentingan umum atau kelompok yang mengontrol keuangannya.

ii. LNP yang dikontrol oleh pemerintah

LNP kelompok ini mencakup LNP yang dikontrol oleh pemerintah, dan menjual jasanya pada tingkat harga yang berbasis nonmarket yaitu tingkat harga yang tidak didasarkan atas biaya produksi, bahkan diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Kontrol atas LNP didefinisikan sebagai kewenangan dalam menentukan kebijakan dan program lembaga. Dalam menentukan apakah suatu LNP dikontrol pemerintah, ada lima indikator yang perlu dipertimbangkan yakni:

1. Penunjukan petugas, dalam hal ini pemerintah berhak menunjuk petugas pengelola lembaga, berdasarkan konstitusi, anggaran dasar, atau instrumen lainnya;
2. Instrumen lain, instrumen yang berisi ketentuan lain di luar penunjukan petugas, yang memungkinkan pemerintah menentukan aspek penting dalam kebijakan umum atau program lembaga;

3. Kontrak perjanjian, keberadaan perjanjian antara pemerintah dan lembaga memungkinkan pemerintah menentukan aspek kunci dalam kebijakan umum atau program lembaga;
4. Tingkat pembiayaan, lembaga yang utamanya dibiayai pemerintah dapat dikontrol oleh pemerintah. Secara umum, jika LNP dapat menentukan kebijakan atau program sepanjang garis yang tersebut pada indikator sebelumnya, dianggap tidak dikontrol oleh pemerintah;
5. Eksposur risiko, jika pemerintah secara terbuka dimungkinkan akan terkena seluruh atau sebagian risiko finansial yang terkait dengan aktivitas lembaga, maka pengaturan itu merupakan bentuk kontrol.

iii. LNP yang menyediakan jasa bagi rumah tangga

Kelompok LNP ini dibedakan atas :

- LNP yang menyediakan barang dan jasa bagi rumah tangga, dengan tingkat harga yang berarti secara ekonomi. Output lembaga semacam ini sebesar biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga.
- LNP yang menyediakan jasa bagi rumah tangga secara gratis atau dengan tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi (nonkomersial). Output lembaga ini sebesar biaya yang dikeluarkan oleh LNPRT dan dikeluarkan (aktual) oleh rumah tangga.
- LNP yang menyediakan jasa kolektif secara gratis atau dengan harga yang tidak berarti secara ekonomi. Output lembaga ini sebesar biaya yang dikeluarkan (aktual) oleh LNPRT. Jasa kolektif umumnya dikonsumsi seluruh masyarakat, seperti hasil penelitian yang dapat diakses setiap orang, administrasi publik

nasional dan daerah, dsb. Dalam teori ekonomi, jasa kolektif disebut sebagai barang publik (*public goods*).

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT)

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output nonpasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output ini dihitung dari seluruh pengeluaran LNPRT untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll;
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya;
- c. Penyusutan;
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

LNPRT mencakup LNP yang termasuk kelompok LNP yang melayani rumah tangga. LNPRT ini dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

i. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi, dan terdiri dari:

- Ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ICMI;

- Ormas kepemudaan, seperti KNPI, HMI, Pemuda Pancasila;
- Ormas wanita, seperti Fatayat, Kalyana Mitra Wanita, dan;
- Ormas lain seperti Kosgoro, Partai Politik, Pepabri.

ii. **Organisasi Sosial (Orsos)**

Organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik yang mempunyai badan hukum maupun tidak sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial dan terdiri dari panti asuhan, panti werda, panti lainnya, seperti Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC), panti tuna netra, dan sejenisnya.

iii. **Organisasi Profesi (Orprof)**

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sebagai wahana pengabdian masyarakat, dan terdiri dari:

- Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Sosial, seperti: ISEI, IAI;
- Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Pasti, seperti: PII, IDI.

iv. **Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi**

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat untuk mengembangkan apresiasi budaya, olahraga, hobi, kegiatan yang bersifat sosial, dan terdiri dari:

- Perkumpulan sosial seperti Perkumpulan Rotari Indonesia, WIC;
- Organisasi Kebudayaan seperti Padepokan Seni dan Budaya, Himpunan Penghayat Kepercayaan;
- Organisasi Olahraga seperti PSSI, PBSI, Ikatan Motor Indonesia; dan

- Organisasi Hobi seperti Ikatan Penggemar Anggrek, ORARI, dan Wanadri.

v. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar kemandirian atau swadaya, dan terdiri dari:

- LSM Penyebar Informasi seperti PKBI, YLKI, Walhi;
- LSM Pendidikan dan Pelatihan seperti LP3ES, Yayasan Bina Swadaya;
- LSM Konsultasi dan Advokasi seperti YLBHI;
- LSM Penelitian dan Studi Kebijakan seperti Lembaga Studi Pembangunan.

vi. Lembaga Keagamaan

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan, mensyiarkan agama, dan terdiri dari:

- Organisasi Islam, seperti Lembaga Dakwah, Remaja Masjid, Majelis Taklim;
- Organisasi Kristen/Protestan, seperti PGI, KWI, HKBP;
- Organisasi Hindu/Budha seperti Walubi, Parisadha Hindu Dharma;
- Perkumpulan Jamaah Masjid;
- Perkumpulan Jemaat Gereja/tempat ibadah lain;
- Pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya.

vii. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa

Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberi bantuan pada korban bencana atau penerima beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta sesama, solidaritas, dan terdiri dari:

- Lembaga Bantuan Kemanusiaan, seperti Yayasan Kesejahteraan Gotong Royong, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat;
- Lembaga Bantuan Pendidikan seperti GNOTA, Yayasan Supersemar;
- Lembaga Bantuan Lainnya.

b. Sumber Data dan Metode Penghitungan

1. Sumber data

i. PK-LNPRT Tahunan adh Berlaku

- Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis input.

Data berasal dari hasil pengolahan Survei Khusus Lembaga Non-Profit dengan unit sampling LNPRT dan lag satu tahun (SK-LNP 2011 berisi data 2010). Survei ini dilaksanakan setiap tahun di beberapa provinsi. Provinsi yang terkena sampel dapat menggunakan data ini untuk penghitungan. Sedangkan provinsi yang tidak terkena sampel dapat menggunakan hasil SK-LNP provinsi lain yang karakteristik LNPRT-nya mirip.

- Populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

Populasi LNPRT menurut jenis lembaga diperoleh dari Kesbanglinmas setempat, Dinas Pemuda dan Olahraga, Departemen agama dan kantor lain yang punya informasi tentang jumlah organisasi di wilayahnya. Untuk provinsi yang terkena sampel SKLNP dapat menggunakan data hasil *up-dating* direktori LNPRT.

ii. PK-LNPRT Tahunan adh Konstan

Data yang diperlukan untuk menghitung PK-LNPRT Tahunan adalah data PK-LNPRT Triwulanan adh konstan.

2. Metode Penghitungan

i. PK-LNPRT Tahunan adh Berlaku

Dengan asumsi bahwa lembaga ini tidak melakukan kegiatan ekonomis produktif, maka nilai PK-LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam rangka melakukan aktivitas pelayanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT³³ sama dengan nilai konsumsi antara ditambah biaya primer (kompensasi pegawai, penyusutan, dan pajak atas produksi lainnya). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). Jika menggunakan *input* yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku.

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, dengan menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan input. Rata-rata pengeluaran diperoleh dari hasil SKLNP yang dilaksanakan setiap tahun.

Rumusan rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya adalah sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan input

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan input

33 Biaya produksi LNPRT sama dengan konsumsi akhir LNPRT

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Input LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Estimasi PK-LNPRT, setelah nilai rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga, dan populasi LNPRT diperoleh, maka estimasi PK-LNPRT menggunakan rumusan :

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

ii. PK-LNPRT Tahunan adh Konstan

PK-LNPRT tahunan adh konstan dihitung dengan menjumlahkan PK-LNPRT triwulanan adh konstan, sbb:

$$Y = Y_{Q1} + Y_{Q2} + Y_{Q3} + Y_{Q4}$$

Y : PK-LNPRT adh konstan tahunan

Y_{Q1} : PK-LNPRT adh konstan triwulan I

Y_{Q2} : PK-LNPRT adh konstan triwulan II

Y_{Q3} : PK-LNPRT adh konstan triwulan III

Y_{Q4} : PK-LNPRT adh konstan triwulan IV

5.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan baik sebagai konsumen, produsen, dan sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal

maupun moneter. Dalam *System of National Accounts* (SNA) 2008, disebutkan bahwa unit pemerintah merupakan unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Dalam peran di atas, pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi nonpasar.

a. Konsep dan Definisi

Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah menyediakan barang dan jasa pada individu atau masyarakat secara gratis atau pada harga yang tidak signifikan secara ekonomi. Untuk sektor pemerintah, besarnya nilai PK-P sama dengan output nonpasar pemerintah, ditambah dengan nilai barang dan jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk disalurkan ke individu rumah tangga dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (*social transfer in kind*) dan output Bank Indonesia, dikurangi dengan penerimaan dari penjualan barang dan jasa. Output nonpasar pemerintah diestimasi melalui pendekatan biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa pada individu atau masyarakat, diantaranya: konsumsi antara, kompensasi pekerja, serta perkiraan konsumsi barang modal tetap.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup aktivitas :

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah;
2. Memproduksi jasa Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan nonkomoditas (pendapatan jasa).

Seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, yaitu :

- a. Berdasarkan barang atau jasa apakah diproduksi oleh produsen pasar atau nonpasar;
- b. Berdasarkan pengeluaran kolektif atau individu;
- c. Berdasarkan fungsi (COFOG /*Classification of the Functions of Government*);
- d. Berdasarkan jenis barang dan jasa (CPC/*Central Product Classification*).

b. Sumber data dan Metode Penghitungan

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adalah pengeluaran atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pemerintahan umum, terdiri dari jasa kolektif serta barang dan jasa individu tertentu. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terdiri dari output nonpasar kurang penerimaan penjualan insidental/penerimaan penjualan barang dan jasa tambah nilai barang dan jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk disalurkan ke individu rumah

tangga dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (*social transfer in-kind/STIK*). STIK adalah pengeluaran pemerintah atau LPNRT atas barang atau jasa yang dihasilkan produsen pasar yang langsung diberikan ke rumah tangga, secara individu atau kolektif tanpa pengolahan lebih lanjut. STIK di Indonesia teridentifikasi sebagai Beras Miskin (Raskin), yang berubah menjadi Beras Sejahtera (Rastra), dan kemudian beralih menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Output Bank Indonesia dicatat sebagai pengeluaran konsumsi kolektif pemerintah, meskipun dalam hal ini pemerintah tidak menanggung biaya yang dikeluarkan oleh bank sentral karena jasa kebijakan moneter yang dihasilkan oleh bank sentral dianggap sebagai output pemerintah, sehingga *current transfer* nilai output nonpasar harus dicatat sebagai pembayaran oleh bank sentral dan diterima pemerintah untuk menutup pembelian output nonpasar bank sentral oleh pemerintah.

Output nonpasar terdiri dari barang dan jasa individu atau kolektif yang dihasilkan LPNRT atau pemerintah, yang disediakan secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak signifikan secara ekonomi ke unit lain atau masyarakat secara keseluruhan. Nilai output nonpasar yang disediakan untuk rumah tangga baik tanpa dikenakan biaya atau dengan biaya yang tidak signifikan, diestimasi sebagai jumlah biaya produksi sebagai berikut:

- a. Konsumsi antara;
- b. Kompensasi pekerja;
- c. Konsumsi barang modal tetap;
- d. Pajak lainnya (kurang subsidi) atas produksi.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan cara deflasi. Untuk belanja pegawai dideflasi menggunakan indeks upah, belanja barang dan belanja bantuan sosial dideflasi menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar

(IHPB) umum tanpa ekspor, konsumsi barang modal tetap dideflasi menggunakan implisit Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), penerimaan dari penjualan barang dan jasa serta raskin dideflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum.

5.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah, melalui peningkatan kapasitas produksi. Di dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi dalam bentuk fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI).

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

a. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

PMTB menggambarkan penambahan dan pengurangan barang modal yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun,

serta akan mengalami Konsumsi barang modal tetap sepanjang usia pakai. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Konsumsi barang modal tetap (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode. Secara umum, barang modal dapat diklasifikasikan menurut 4 (empat) golongan, yaitu : menurut jenis barang modal, lapangan usaha, institusi, dan wilayah asal. Dalam kerangka penyusunan PDB, PMTB dirinci menurut jenis barang modal, yaitu :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

b. Sumber Data dan Metode Penghitungan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi;
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai);

- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga;
- d. Laporan keuangan perusahaan;
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang;
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar;
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan nonmigas);
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum;
- i. Publikasi Statistik Konstruksi;
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang/jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "*supply*" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh konstan, maka PMTB adh berlaku tersebut di "*deflate*" (dibagi) dengan IHPB yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh berlaku maupun adh konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi

pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh berlaku. Untuk memperoleh nilai adh konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh berlaku, nilai PMTB adh konstan tersebut di- "*reflate*"(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh konstan adalah dengan cara men-"*deflate*" PMTB adh berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada

periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh konstannya diperoleh dengan men-deflate nilai adh berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Sementara itu, bila akan dilakukan penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), maka akan ditemui beberapa permasalahan seperti:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis.

Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.

- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

5.5 Perubahan Inventori (PI)

Dalam sistem neraca nasional, inventori dapat dilihat dari sudut pandang posisi (*stocks*) maupun transaksi (*flows*). Jika dilihat dari sudut pandang posisi (*stocks*), inventori merupakan salah satu komponen pada *balance sheet*. Adapun jika dilihat dari sudut

pandang transaksi (*flows*), inventori merupakan salah satu komponen PDB menurut pengeluaran.

Dalam PDB, perubahan inventori merupakan bagian dari pembentukan modal bruto atau lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan porsi investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang-barang persediaan yang masih tertahan untuk diproses lebih lanjut pada kegiatan produksi atau dijual tanpa mengalami proses lebih lanjut pada satu periode waktu tertentu. Dengan demikian, ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk kebutuhan analisis mengenai investasi.

a. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori atau yang lazimnya dikenal sebagai persediaan adalah berbagai barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai guna yang lebih tinggi. Dalam hal ini, inventori juga mencakup persediaan barang yang masih dalam pengerjaan serta barang jadi yang belum dipasarkan yang masih ditahan/dikuasai oleh pihak produsen.

Berdasarkan *System of National Accounts* (SNA) 2008, inventori didefinisikan sebagai aset berupa barang dan jasa yang disimpan untuk kemudian dijual, digunakan dalam kegiatan produksi atau penggunaan lainnya di waktu mendatang. Inventori terdiri dari persediaan output yang masih disimpan oleh unit yang memproduksinya yang bertujuan untuk diproses lebih lanjut, dijual, diberikan kepada unit lain atau digunakan untuk keperluan lain. Selain itu, inventori juga terdiri dari persediaan barang dan jasa yang diperoleh dari unit lain yang bertujuan untuk digunakan sebagai input antara atau dijual

kembali tanpa pengolahan lebih lanjut. Inventori dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, antara lain:

1. Bahan baku dan penolong (*materials and supplies*);
2. Barang dalam penyelesaian (*work in progress*) yang terdiri dari *work in progress on cultivated biological assets* dan *other work in progress*;
3. Barang jadi (*finished products*);
4. Barang/jasa untuk dijual kembali (*goods for resale*); dan
5. Inventori militer (*military inventories*).

Perubahan inventori menunjukkan transaksi yang terjadi dalam inventori. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Perubahan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke dalam inventori dikurangi nilai barang yang keluar dari inventori dan kerugian dari penyimpanan barang selama satu periode.

Dalam kerangka PDB atau Tabel I-O, inventori disajikan sebagai bagian dari konsumsi akhir (*final demand*), tepatnya terletak pada kuadran II di dalam tabel I-O. Selama ini, pada kedua kerangka data tersebut inventori diperlukan sebagai komponen residual yang di dalamnya masih mencakup perbedaan statistik (*statistical discrepancy*). Kondisi ini menyebabkan informasi tentang inventori sulit dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Secara konsep, inventori dalam bentuk persediaan barang menggambarkan bagian dari output domestik dan impor yang belum digunakan, baik untuk diproses lebih lanjut maupun untuk tujuan dijual tanpa diproses lebih lanjut. Inventori yang dimaksud dapat berbentuk bahan baku (*raw material*), barang setengah jadi (*work in progress*) ataupun barang jadi (*finished goods*).

Komponen perubahan inventori mulai diperkenalkan bersamaan dengan terjadinya perubahan tahun dasar di tingkat nasional dari tahun dasar 1993 ke tahun 2000, tepatnya pada triwulan I tahun 2004. Terkait dengan perubahan tahun dasar 2000 ke tahun 2010, komponen perubahan inventori perlu dihitung tersendiri, yakni terpisah dari *statistical discrepancy*. Dengan demikian, perubahan inventori tidak diperlakukan sebagai komponen penyeimbang (*balancing item*) pada PDB menurut pengeluaran.

Dalam konteks mikro (perusahaan), transaksi inventori menjelaskan informasi tentang posisi cadangan atau persediaan barang jadi, barang dalam pengerjaan (setengah jadi), bahan baku serta bahan penolong, barang dagangan dan barang dalam perjalanan perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Data tersebut disajikan dalam laporan neraca akhir tahun. Dalam laporan tersebut, inventori dicatat sebagai bagian dari harta lancar (*current asset*) pada sisi kiri neraca yang merupakan bagian dari aset/kekayaan perusahaan. Pada umumnya, data tersebut disajikan secara agregat (tidak dirinci menurut jenis inventori) bersama-sama dengan komponen harta lancar lainnya, di dalamnya termasuk juga nilai penyisihan atas inventori yang rusak atau usang. Selain produsen (*inventory holder*), penguasa inventori lainnya adalah sektor perdagangan dan pemerintah. Masing-masing pelaku ekonomi tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda dalam melakukan penyimpanan barang-barang inventori.

Dari sudut pandang produsen, keberadaan inventori ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan kegiatan proses produksi, sehingga diperlukan pencadangan baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Selain itu, ketidakpastian pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Adapun dari sudut pandang pedagang,

pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Adapun bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Hal ini dilakukan karena komoditas tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik). Komoditas yang dicakup diantaranya meliputi komoditas beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir.

Secara makro, di dalam statistik neraca nasional, inventori dicakup sebagai bagian dari pembentukan modal atau dikenal sebagai inventasi fisik di satu wilayah. Inventori menjelaskan tentang porsi dari investasi yang telah direalisasikan dalam bentuk barang jadi maupun setengah jadi pada berbagai kegiatan produksi. Sebagian dari investasi juga direalisasikan untuk pengadaan berbagai keperluan bahan baku maupun bahan penolong/pembantu. Dengan demikian, ketersediaan data tentang inventori akan menjadi informasi yang cukup penting bagi analisis investasi khususnya bagi komponen pembentukan modal, meskipun kontribusinya dalam perekonomian tidak terlalu besar.

Pada prinsipnya, inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi sebagai input antara atau untuk dijual tanpa mengalami proses lebih lanjut. Klasifikasi inventori dalam keperluan penghitungan perubahan inventori dapat dibedakan atas:

- a. Inventori menurut sektor penghasilnya, seperti produk atau hasil dari perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi/bangunan;

- b. Inventori menurut jenis barang yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
- Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
 - Barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproses tapi belum terjual atau belum digunakan;
 - Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai diproduksi (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
 - Barang untuk dijual kembali, yakni barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
 - Hewan ternak untuk tujuan dipotong;
 - Persediaan komoditas/barang-barang strategis, seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum yang dikuasai oleh pemerintah.

b. Sumber Data dan Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan perubahan inventori yaitu:

- a. Laporan keuangan perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN/BUMD yang diperoleh dengan cara mengunduhnya dari *website* terkait;
- b. Publikasi statistik industri besar dan sedang;
- c. Publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- d. Publikasi statistik peternakan, antara lain:
 - Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil; dan
 - Statistik Perusahaan Peternakan Unggas;
- e. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) terpilih; dan

- f. Data eksternal lainnya seperti data beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), dan sebagainya.

Metode yang digunakan dalam penghitungan perubahan inventori terdiri dari dua pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan langsung dari sisi “korporasi” atau unit usaha dan pendekatan tidak langsung dari sisi “komoditas” atau jenis barang. Kedua pendekatan tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pendekatan dari Sisi Korporasi

Pada pendekatan ini, perubahan inventori dihitung dengan cara mengubah data perubahan inventori pada neraca perusahaan ke dalam neraca nasional. Pendekatan ini dilakukan untuk menghitung perubahan inventori dari laporan keuangan perusahaan dan laporan tahunan hasil survei industri besar dan sedang. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengestimasi nilai perubahan inventori antara lain sebagai berikut:

- a. Menghitung nilai posisi inventori atas dasar harga konstan dengan membagi nilai buku inventori dengan deflator harga (IHPB) bulan terakhir di tahun berjalan yang bersesuaian;
- b. Menghitung nilai perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengambil selisih antara nilai posisi inventori atas dasar harga konstan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Angka yang dihasilkan menunjukkan estimasi perubahan inventori pada harga tahun dasar;
- c. Menghitung nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan mengalikan nilai perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan indeks harga (IHPB) rata-rata pada tahun berjalan yang bersesuaian.

Pendekatan dari Sisi Komoditas

Pada pendekatan ini, perubahan inventori dihitung dengan cara mengalikan harga dan perubahan volume komoditas. Metode estimasi ini membutuhkan informasi mengenai seluruh barang yang masuk dan keluar dari inventori. Masuk dan keluarnya barang dari inventori harus dinilai menggunakan harga saat transaksi dilakukan. Akan tetapi, penggunaan metode ini seringkali berhadapan dengan masalah ketersediaan data.

Jika data yang tersedia hanya terkait dengan posisi inventori, maka estimasi perubahan inventori dapat dilakukan dengan cara mengalikan perubahan kuantitas inventori dengan harga rata-rata produk selama satu periode. Perubahan inventori atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan perubahan kuantitas dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Langkah-langkah mengestimasi nilai perubahan inventori :

- a. Menghitung jumlah komoditas inventori dengan kriteria sesuai dengan jenisnya;
- b. Menghitung nilai posisi inventori setiap jenis komoditas dengan mengalikan jumlah/kuantitas komoditas yang menjadi inventori dengan harga komoditas tersebut pada tahun berjalan dalam satuan unit yang ditentukan;
- c. Menghitung nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan mengambil selisih antara nilai posisi inventori pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
- d. Menghitung nilai posisi inventori atas dasar harga konstan dengan mengalikan jumlah/kuantitas komoditas yang menjadi inventori dengan harga komoditas tersebut pada tahun dasar dalam satuan unit yang ditentukan;
- e. Menghitung nilai perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengambil selisih antara nilai posisi inventori atas dasar harga konstan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori antara lain sebagai berikut:

- Data inventori yang dibutuhkan dalam bentuk posisi pada periode waktu berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up* untuk melengkapi estimasi pada industri yang datanya tidak tersedia.

5.6 Ekspor/Impor Barang dan Jasa

Ekspor impor merupakan aktivitas yang hampir dilakukan setiap negara untuk memenuhi kebutuhan domestik. Perbedaan barang dan jasa yang diproduksi dan disparitas harga komoditas menyebabkan negara-negara melakukan simbiosis mutualisme melalui perdagangan internasional. Negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari negara lain. Sementara itu, negara yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik, juga terdorong memperluas pasar ke luar negeri.

Di sisi lain, seiring perkembangan zaman, jumlah penduduk yang semakin banyak diiringi oleh aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa yang semakin meningkat dan beragam mendorong aktivitas ekspor impor semakin berkembang. Selain itu, kemajuan bidang transportasi dan komunikasi juga ikut memperlancar distribusi barang dan jasa.

a. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden (United Nations et al., 2009). Alih kepemilikan berarti semua kepemilikan hak, manfaat, risiko, dan tanggung jawab telah dipindahkan yang dapat dilakukan melalui transaksi pembelian, penjualan, barter, dan hibah. Sementara itu, suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.

Ekspor impor menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.

Ekspor dan Impor merupakan aktivitas perdagangan barang dan jasa antara residen Indonesia dengan residen negara lain (nonresiden). Dalam transaksi ekspor, termasuk pembelian langsung nonresiden atas barang dan jasa di wilayah domestik, seperti pembelian barang dan jasa oleh wisatawan asing di wilayah Indonesia. Begitu pula sebaliknya, pembelian langsung barang dan jasa di luar negeri oleh residen Indonesia dikategorikan sebagai impor.

b. Sumber Data dan Metoda Penghitungan

Penghitungan ekspor impor barang mencakup seluruh komoditas yang ditransaksikan baik melalui perdagangan, barter, maupun *grant*. Ekspor impor barang

dalam PDB diklasifikasikan menurut minyak bumi dan gas (migas) dan nonmigas. Ekspor dan impor³⁴ barang dinilai menurut harga *Free on Board* (FOB)³⁵ dan dalam satuan Rupiah. Terkait dengan hal tersebut maka data ekspor dan impor dari dokumen kepabeanan perlu dikonversi terlebih dahulu dengan kurs transaksi rata-rata karena masih dalam satuan Dolar Amerika Serikat (USD). Hasil ini kemudian ditambahkan dengan estimasi transaksi *undocumented* sehingga didapatkan ekspor dan impor barang adh berlaku.

Penghitungan ekspor impor jasa mencakup 12 jenis jasa yang ditransaksikan (Jasa pengolahan input fisik yang dimiliki pihak lain; Jasa pemeliharaan dan perbaikan; Jasa transportasi; Jasa perjalanan; Jasa konstruksi; Jasa asuransi dan pensiun; Jasa keuangan; Biaya atas penggunaan kekayaan intelektual; Jasa telekomunikasi, komputer dan informasi; Jasa perusahaan lain; Jasa personal, budaya, dan rekreasi; dan Barang dan jasa pemerintah). Data yang digunakan bersumber dari Statistik Pariwisata yang dihasilkan oleh BPS dan Statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dihasilkan Bank Indonesia (BI). Kedua sumber data tersebut selanjutnya dikonversi dengan kurs transaksi rata-rata tertimbang sehingga diperoleh estimasi ekspor impor jasa adh berlaku.

Penghitungan estimasi ekspor dan impor adh konstan diperoleh dengan metode deflasi, yaitu membagi ekspor atau impor adh berlaku dengan indeks harga (deflator) yang bersesuaian. Deflator ekspor impor barang adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) ekspor dan impor menurut HS 2 digit, sedangkan deflator ekspor impor jasa adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) domestik dan internasional.

34 Konsep sebelumnya menurut harga CIF (*Cost Insurance and Freight*)

35 Harga diatas kapal, tidak termasuk biaya angkut, premi asuransi dan biaya pelabuhan lainnya

5.7 Konsumsi Barang Modal Tetap

Konsumsi barang modal tetap merupakan bagian dari biaya produksi, yang menjelaskan tentang berkurangnya nilai barang modal secara ekonomi. Konsumsi barang modal tetap bukan faktor pendapatan sehingga harus dikeluarkan dari penghitungan PDB.

a. Konsep dan Definisi

Konsumsi barang modal tetap merupakan pengurangan nilai barang modal dalam suatu periode akuntansi. Pengurangan atau susutnya nilai barang modal (*consumption of fixed capital*) bisa secara ekonomis maupun teknis, karena digunakan dalam suatu proses produksi. Agar supaya nilai aset kembali pada posisi semula, maka harus dilakukan pengembalian barang modal melalui penyisihan nilai kapital ausnya nilai barang modal dalam proses produksi. Di sisi lain, konsumsi barang modal tetap yang merupakan tabungan di perusahaan akan menjadi salah satu sumber pembiayaan investasi fisiknya.

b. Sumber data dan Metode Penghitungan

Konsumsi barang modal tetap diperhitungkan dari nilai PMTB, atau dari nilai barang modal yang ada (stok kapital). Dari hasil kajian, menunjukkan bahwa usia pakai barang modal antar jenis sangatlah bervariasi, yakni antara 3 s.d 60 tahun. Rasio nilai konsumsi barang modal tetap setiap tahun diasumsikan sama besar, atau menggunakan proporsi yang sama antar tahun. Untuk itu, digunakan rata-rata konsumsi barang modal tetap sekitar 5 persen dari total nilai PDB. Umumnya, penghitungan Konsumsi barang modal tetap perusahaan di Indonesia menggunakan Metode “garis lurus”, atau mengikuti pola dan struktur barang modal pada masing-masing tahun, meskipun secara empiris, Konsumsi barang modal tetap sangat dipengaruhi oleh faktor “usia” serta “usai” pemakaian masing-masing barang modal.

5.8 Pajak Tidak Langsung (*Neto*)

Pajak merupakan kewajiban pembayaran perusahaan maupun rumah tangga (masyarakat) pada pemerintah. Di sisi lain, pajak akan menjadi bagian dari penerimaan pemerintah. Hanya pajak tidak langsung dan subsidi (*current transaction*) yang terkait dengan perangkat PDB, sedangkan pajak langsung akan dicakup pada komponen yang lain. Pajak tidak langsung *neto* adalah pajak tidak langsung dikurangi subsidi.

a. Konsep dan Definisi

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi oleh unit usaha³⁶. Secara tidak langsung, pajak ini dibebankan pada konsumen melalui harga produk yang dijual (dibeli konsumen). Pajak tidak langsung dan subsidi merupakan unsur yang mempunyai transaksi berlawanan. Pajak tidak langsung merupakan penerimaan pemerintah dari masyarakat, sedangkan subsidi merupakan bantuan (transfer) yang diberikan pemerintah pada masyarakat.

b. Sumber data dan Metode Penghitungan

Informasi tentang pajak tidak langsung dapat diperoleh dari laporan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

5.9 Pendapatan atas Faktor Produksi dari Luar Negeri

Komponen ini merupakan sumber atau bagian dari pendapatan masyarakat domestik, yang secara spesifik menggambarkan tentang aliran transaksi dalam bentuk pendapatan faktorial dari luar negeri dan/atau sebaliknya. Pendapatan faktor produksi merupakan pendapatan yang ditimbulkan karena adanya kepemilikan faktor-faktor produksi di suatu negara, seperti lahan (*land*), modal (*capital*), tenaga kerja (*labor*), serta

36 Secara langsung pajak tersebut dibayarkan oleh perusahaan

manajemen (*entrepreneur*). Faktor produksi tersebut digunakan oleh nonresiden sehingga menimbulkan aliran devisa ke dalam negeri. Pendapatan neto atas faktor produksi terhadap luar negeri merupakan selisih pendapatan atas faktor produksi dari luar wilayah domestik yang faktornya dimiliki oleh Indonesia dikurangi dengan pendapatan atas faktor produksi yang berada di wilayah domestik yang faktornya dimiliki oleh (nonresiden).

a. Konsep Definisi

Pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri merupakan penerimaan atau balas jasa faktor produksi tenaga kerja maupun bukan tenaga kerja (modal/kapital), serta faktor atau harta kepemilikan lain. Pendapatan dari faktor produksi tenaga kerja berupa kompensasi tenaga kerja berupa upah dan gaji, serta tunjangan lain. Sedangkan pendapatan faktor bukan-tenaga kerja mencakup kompensasi dalam bentuk bunga, deviden, royalti, dan sejenisnya. Transaksi tersebut sering diartikan juga sebagai pendapatan dari investasi. Dengan demikian maka *pendapatan neto atas faktor produksi terhadap luar negeri* merupakan selisih pendapatan atas faktor produksi dari luar wilayah domestik (yang faktor produksinya dimiliki Indonesia) dikurangi pendapatan faktor produksi yang berada di wilayah domestik (yang faktor produksinya dimiliki nonresiden).

b. Sumber data dan Metode Penghitungan

Nilai pendapatan “neto” luar negeri atas faktor produksi tenaga kerja maupun bukan-tenaga kerja diperoleh dari neraca pembayaran luar negeri (*Balance of Payment*) Bank Indonesia. Data yang diperoleh masih dalam satuan nilai dolar Amerika (US \$), sehingga harus dikonversi ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs nilai ekspor dan nilai impor rata-rata tertimbang. Untuk pendapatan faktor produksi yang berasal dari luar negeri dikonversi dengan menggunakan kurs ekspor, sedangkan pendapatan faktor

produksi ke luar negeri dikonversikan dengan menggunakan kurs impor. Hasil penghitungan tersebut merupakan estimasi pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri adh berlaku. Perkiraan pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri adh konstan dihitung dengan cara deflasi, yaitu dengan membagi estimasi pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri adh berlaku dengan indeks harga yang sesuai. Indeks yang digunakan adalah indeks harga per-unit impor dan indeks harga per-unit ekspor.

5.10 Transfer Berjalan (*Current Transfer*)

Untuk memperoleh pendapatan disposabel maka pendapatan nasional harus ditambah (atau dikurangi) dengan transfer berjalan.

a. Konsep dan Definisi

Transfer merupakan proses pendistribusian (pengalokasian) kembali pendapatan faktor yang dimiliki oleh berbagai institusi pada pihak lain secara cuma-cuma, tanpa ada suatu ikatan. Transfer yang dimaksud adalah transfer berjalan (*current transfer*), yang umumnya berupa pemberian hibah atau sumbangan untuk bencana alam, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

b. Sumber data dan Metode Penghitungan

Nilai transfer "*neto*" terhadap luar negeri diperoleh dari neraca pembayaran luar negeri (*Balance of Payment*) Bank Indonesia. Data yang diperoleh masih dalam satuan nilai dolar Amerika (US\$), sehingga harus dikonversi ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs nilai ekspor dan nilai impor rata-rata tertimbang. Untuk penerimaan transfer yang berasal dari luar negeri dikonversi dengan kurs ekspor, sedangkan untuk pembayaran transfer ke luar negeri dikonversi dengan kurs impor. Nilai hasil estimasi tersebut merupakan perkiraan nilai transfer adh berlaku.

<https://www.bps.go.id>

BAB VI

PENUTUP

1. PDB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d 2017 menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional. Lima kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, pemerintah, perusahaan finansial dan perusahaan nonfinansial.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 s.d 2017, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti: pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan penyajian data ekonomi makro lain seperti: PDB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output (I-O), Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, pendapatan faktorial neto (*net factorial income*) dari luar negeri, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

DAFTAR ISTILAH/GLOSSARIES

Domestik

Merupakan batas teritori aktivitas ekonomi, yang hampir mendekati konsep wilayah teritori negara secara hukum (batas administrasi). Istilah domestik merupakan terminologi baku yang digunakan di dalam penyusunan statistik neraca nasional yang memberikan batasan yang jelas tentang kawasan ekonomi penduduk, baik residen maupun non-residen.

Ekspor Barang dan Jasa

Mencakup seluruh penjualan barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lain, yang berlangsung baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam praktek, ekspor terdiri dari barang dagangan dan barang lain yang keluar melalui batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung di negara tersebut oleh non-residen. Karena ekspor barang dagangan dinilai adh FOB (*free on board*), maka nilai ekspor tidak termasuk biaya angkut dan asuransi sampai ke negara tujuan.

Ekonomi domestik

Merupakan aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam batas wilayah domestik suatu negara. Ekonomi domestik dibedakan dengan luar negeri (*rest of the world*) karena konsep “residen”, bukan karena unsur kebangsaan atau mata uang. Ekonomi domestik mencakup aktivitas ekonomi yang diselenggarakan oleh residen. Konsep ini tidak selalu identik dengan batas wilayah administrasi secara politik.

Faktor Produksi

Mencakup faktor yang terlibat dalam aktivitas produksi, baik langsung maupun tidak langsung, seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan.

Pendapatan atas Faktor Produksi dari Luar Negeri

Merupakan pendapatan atau kompensasi yang diterima oleh pemilik atau penguasa faktor produksi, karena terlibatan dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di luar batas wilayah domestik.

Harga Berlaku

Penilaian atas barang dan jasa (produk) yang dihasilkan atau dikonsumsi, dengan menggunakan tingkat harga pada tahun berjalan.

Harga Konstan

Penilaian atas barang dan jasa (produk) yang dihasilkan atau dikonsumsi, dengan menggunakan tingkat harga pada tahun dasar tertentu.

Impor Barang dan Jasa

Mencakup seluruh pembelian barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lain, baik berlangsung di dalam wilayah domestik suatu negara maupun di luar negeri. Dalam praktek, impor terdiri dari barang dagangan dan barang lain yang melewati batas pabean, termasuk pembelian langsung oleh residen di luar negeri. Barang dagangan impor juga dinilai secara FOB (*Free on Board*), sehingga nilai barang tersebut tidak termasuk biaya angkut dan asuransi.

Pembentukan Modal Tetap

Mencakup pembuatan dan pembelian barang modal baru, baik dari dalam maupun luar negeri (impor), termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicatat hanya yang dilakukan oleh residen (unit ekonomi domestik) suatu negara/wilayah.

Penyusutan

Merupakan nilai susut suatu barang modal tetap, karena digunakan di dalam proses produksi.

Permintaan Antara

Merupakan permintaan barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi.

Permintaan Akhir

Merupakan permintaan atas barang dan jasa, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, pembentukan modal, maupun ekspor.

Produk

Merupakan output yang dihasilkan melalui proses produksi yang dilakukan oleh produsen (residen) di dalam batas wilayah domestik suatu negara, pada kurun waktu tertentu. Berbagai jenis produk (disebut juga sebagai komoditas), menurut sifatnya dibedakan atas barang (*good/tangible*) dan jasa (*service/intangible*).

Produk domestik

Merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan untuk konsumsi, investasi dan ekspor di dalam sistem ekonomi domestik, setelah mengeluarkan barang dan jasa yang berasal dari impor. Total penyediaan (*supply*) barang dan jasa di dalam suatu perekonomian dapat berasal dari produk domestik maupun impor.

Residen

Merupakan unit ekonomi yang punya pusat kepentingan ekonomi di dalam batas wilayah suatu negara (*centre of economic interest*). Peran penting ini ditandai oleh dua faktor penting, yaitu tempat tinggal (*dwelling*) dan tempat aktivitas ekonomi, dalam jangka waktu yang relatif panjang, biasanya setahun. Tujuannya untuk membedakan batas teritori suatu negara dari negara lain (*rest of the world*). Unit ekonomi yang bukan residen suatu negara, dianggap sebagai sektor luar negeri (*non-residen*).

Tahun Dasar

Merupakan tahun yang dipilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan di tahun yang lain. Melalui tahun dasar dapat digambarkan series data dengan indikator rinci tentang perubahan atau pergerakan yang terjadi.

Wilayah ekonomi

Merupakan wilayah geografi yang secara administrasi dikelola suatu pemerintahan (negara), di mana manusia, barang dan modal bebas berpindah, yang mencakup wilayah udara, darat maupun perairan. Wilayah ekonomi juga mencakup wilayah khusus seperti kedutaan, konsulat dan pangkalan militer, serta zona bebas aktif (lepas pantai).

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAPHY

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *System of National Accounts 2008*, Studies in Methods, New York, 2009.
16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

18. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 50, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank, *System of National Accounts 2008*, New York, 2009.

**LAMPIRAN/
APPENDICES**

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

**TABEL 1. PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (MILIAR RUPIAH)
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017**

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5.321.087,6	5.915.194,2	6.490.929,7	7.024.996,8	7.626.985,6
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	2.049.781,9	2.247.450,6	2.495.433,4	2.758.583,1	2.980.445,9
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	203.088,5	221.633,2	239.644,4	256.799,9	272.918,1
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	705.521,6	774.867,4	849.310,4	902.130,9	979.454,6
d. Kesehatan dan Pendidikan	359.752,4	394.267,5	433.073,0	472.128,0	515.369,7
e. Transportasi dan Komunikasi	1.246.466,6	1.420.289,1	1.518.754,7	1.598.864,1	1.759.058,5
f. Restoran dan Hotel	499.345,5	570.464,7	636.959,3	695.183,0	756.928,6
g. Lainnya	257.131,1	286.221,7	317.754,5	341.307,8	362.810,2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	103.929,0	124.242,0	130.950,6	144.499,4	160.569,5
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	908.574,3	996.197,4	1.123.749,9	1.183.640,3	1.236.869,0
a. Konsumsi Kolektif	568.131,1	622.774,3	691.754,8	732.490,2	763.292,9
b. Konsumsi Individu	340.443,2	373.423,2	431.995,0	451.150,1	473.576,1
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3.051.496,2	3.436.923,7	3.782.011,9	4.040.204,6	4.370.555,8
a. Bangunan	2.242.779,8	2.569.122,4	2.844.114,6	3.037.239,9	3.283.435,9
b. Mesin dan Perlengkapan	343.132,0	357.548,3	377.471,6	364.798,1	405.905,6
c. Kendaraan	172.446,3	163.609,3	173.850,6	208.133,1	233.928,5
d. Peralatan Lainnya	41.709,1	49.215,1	59.036,1	68.916,2	77.501,4
e. CBR	177.279,6	201.675,9	225.515,5	246.684,1	254.684,5
f. Produk Kekayaan Intelektual	74.149,2	95.752,8	102.023,4	114.433,3	115.099,8
5. Perubahan Inventori	178.090,5	220.230,6	144.178,9	158.867,1	174.517,9
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.283.776,7	2.501.424,8	2.438.992,7	2.372.293,3	2.768.148,8
a. Barang	2.044.358,1	2.223.342,0	2.131.563,4	2.040.317,2	2.403.487,9
a.1. Barang Nonmigas	1.703.498,9	1.869.262,1	1.884.921,2	1.866.720,9	2.193.877,2
a.2. Barang migas	340.859,2	354.079,8	246.642,2	173.596,3	209.610,7
b. Jasa	239.418,5	278.082,9	307.429,3	331.976,1	364.660,9
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2.359.212,1	2.580.508,0	2.394.879,3	2.272.665,8	2.604.350,1
a. Barang	2.012.939,9	2.177.253,0	1.963.460,3	1.851.967,2	2.154.333,6
a.1. Barang Nonmigas	1.523.386,0	1.652.229,2	1.625.135,5	1.596.402,2	1.820.794,9
a.2. Barang migas	489.553,9	525.023,8	338.324,8	255.565,0	333.538,7
b. Jasa	346.272,2	403.255,1	431.419,0	420.698,5	450.016,5
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	9.546.134,0	10.569.705,3	11.526.332,8	12.406.774,1	13.588.797,3

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 2. PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN (MILIAR RUPIAH)
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017**

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4.423.416,9	4.651.018,4	4.881.630,7	5.126.028,3	5.379.519,7
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	1.612.838,8	1.685.184,6	1.776.297,2	1.871.191,7	1.969.233,8
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	182.010,2	190.369,2	198.732,5	205.265,4	211.631,3
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	608.426,7	636.224,5	666.807,4	697.458,8	727.157,0
d. Kesehatan dan Pendidikan	300.791,3	318.154,2	335.479,7	353.409,5	373.147,8
e. Transportasi dan Komunikasi	1.085.322,2	1.148.299,7	1.203.217,4	1.267.219,5	1.334.338,7
f. Restoran dan Hotel	403.321,4	430.250,0	451.793,0	476.172,7	502.481,3
g. Lainnya	230.706,3	242.536,3	249.303,5	255.310,7	261.529,9
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	88.618,0	99.420,0	98.800,0	105.362,3	112.646,9
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	727.812,1	736.283,1	775.398,0	774.281,6	790.858,3
a. Konsumsi Kolektif	455.890,1	459.596,2	476.826,1	477.610,8	484.800,4
b. Konsumsi Individu	271.922,0	276.686,9	298.571,9	296.670,8	306.057,9
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.654.375,0	2.772.470,8	2.911.356,0	3.041.586,6	3.228.747,5
a. Bangunan	1.933.672,0	2.040.386,9	2.165.135,2	2.277.210,0	2.419.271,8
b. Mesin dan Perlengkapan	307.782,4	300.154,2	301.906,5	281.723,1	308.511,9
c. Kendaraan	161.592,5	152.090,5	152.887,4	171.279,9	186.454,3
d. Peralatan Lainnya	37.472,1	40.913,1	44.887,4	50.685,8	55.377,7
e. CBR	149.080,2	160.304,3	166.125,9	174.088,6	175.849,5
f. Produk Kekayaan Intelektual	64.775,8	78.621,7	80.413,6	86.599,2	83.282,3
5. Perubahan Inventori	124.453,6	163.582,6	112.847,9	133.400,1	115.396,4
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.026.113,7	2.047.887,1	2.004.467,0	1.973.040,4	2.152.404,1
a. Barang	1.828.150,1	1.842.728,3	1.797.134,5	1.754.097,4	1.919.478,6
a.1. Barang Nonmigas	1.584.708,7	1.607.807,4	1.538.132,8	1.507.827,8	1.668.340,5
a.2. Barang migas	243.441,4	234.920,9	259.001,8	246.269,6	251.138,1
b. Jasa	197.963,5	205.158,8	207.332,4	218.943,0	232.925,5
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.945.867,3	1.987.113,9	1.862.939,0	1.817.369,5	1.963.783,7
a. Barang	1.665.064,2	1.704.444,3	1.596.173,6	1.558.345,5	1.694.452,5
a.1. Barang Nonmigas	1.338.228,7	1.377.903,8	1.272.091,6	1.237.482,8	1.355.708,2
a.2. Barang migas	326.835,5	326.540,6	324.082,0	320.862,7	338.744,2
b. Jasa	280.803,2	282.669,6	266.765,4	259.024,0	269.331,2
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	8.156.497,8	8.564.866,6	8.982.517,1	9.434.632,3	9.912.749,3

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 3. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017**

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	55,74	55,96	56,31	56,62	56,13
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	21,47	21,26	21,65	22,23	21,93
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,13	2,10	2,08	2,07	2,01
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	7,39	7,33	7,37	7,27	7,21
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,77	3,73	3,76	3,81	3,79
e. Transportasi dan Komunikasi	13,06	13,44	13,18	12,89	12,94
f. Restoran dan Hotel	5,23	5,40	5,53	5,60	5,57
g. Lainnya	2,69	2,71	2,76	2,75	2,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,09	1,18	1,14	1,16	1,18
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,52	9,43	9,75	9,54	9,10
a. Konsumsi Kolektif	5,95	5,89	6,00	5,90	5,62
b. Konsumsi Individu	3,57	3,53	3,75	3,64	3,49
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	31,97	32,52	32,81	32,56	32,16
a. Bangunan	23,49	24,31	24,67	24,48	24,16
b. Mesin dan Perlengkapan	3,59	3,38	3,27	2,94	2,99
c. Kendaraan	1,81	1,55	1,51	1,68	1,72
d. Peralatan Lainnya	0,44	0,47	0,51	0,56	0,57
e. CBR	1,86	1,91	1,96	1,99	1,87
f. Produk Kekayaan Intelektual	0,78	0,91	0,89	0,92	0,85
5. Perubahan Inventori	1,87	2,08	1,25	1,28	1,28
6. Ekspor Barang dan Jasa	23,92	23,67	21,16	19,12	20,37
a. Barang	21,42	21,04	18,49	16,45	17,69
a.1. Barang Nonmigas	17,84	17,69	16,35	15,05	16,14
a.2. Barang migas	3,57	3,35	2,14	1,40	1,54
b. Jasa	2,51	2,63	2,67	2,68	2,68
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	24,71	24,41	20,78	18,32	19,17
a. Barang	21,09	20,60	17,03	14,93	15,85
a.1. Barang Nonmigas	15,96	15,63	14,10	12,87	13,40
a.2. Barang migas	5,13	4,97	2,94	2,06	2,45
b. Jasa	3,63	3,82	3,74	3,39	3,31
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 4. LAJU PERTUMBUHAN Y-ON-Y (PERSEN)
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017**

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5,43	5,15	4,96	5,01	4,95
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	4,35	4,49	5,41	5,34	5,24
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	5,28	4,59	4,39	3,29	3,10
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	5,81	4,57	4,81	4,60	4,26
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,72	5,77	5,45	5,34	5,59
e. Transportasi dan Komunikasi	6,60	5,80	4,78	5,32	5,30
f. Restoran dan Hotel	5,76	6,68	5,01	5,40	5,53
g. Lainnya	5,70	5,13	2,79	2,41	2,44
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,18	12,19	(0,62)	6,64	6,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,75	1,16	5,31	(0,14)	2,14
a. Konsumsi Kolektif	8,32	0,81	3,75	0,16	1,51
b. Konsumsi Individu	4,21	1,75	7,91	(0,64)	3,16
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,01	4,45	5,01	4,47	6,15
a. Bangunan	6,74	5,52	6,11	5,18	6,24
b. Mesin dan Perlengkapan	0,37	(2,48)	0,58	(6,69)	9,51
c. Kendaraan	(5,64)	(5,88)	0,52	12,03	8,86
d. Peralatan Lainnya	4,36	9,18	9,71	12,92	9,26
e. CBR	1,58	7,53	3,63	4,79	1,01
f. Produk Kekayaan Intelektual	16,54	21,38	2,28	7,69	(3,83)
5. Perubahan Inventori	(28,55)	31,44	(31,01)	18,21	(13,50)
6. Ekspor Barang dan Jasa	4,17	1,07	(2,12)	(1,57)	9,09
a. Barang	3,81	0,80	(2,47)	(2,39)	9,43
a.1. Barang Nonmigas	7,14	1,46	(4,33)	(1,97)	10,65
a.2. Barang migas	(13,64)	(3,50)	10,25	(4,92)	1,98
b. Jasa	7,57	3,63	1,06	5,60	6,39
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,86	2,12	(6,25)	(2,45)	8,06
a. Barang	2,03	2,37	(6,35)	(2,37)	8,73
a.1. Barang Nonmigas	0,90	2,96	(7,68)	(2,72)	9,55
a.2. Barang migas	6,90	(0,09)	(0,75)	(0,99)	5,57
b. Jasa	0,90	0,66	(5,63)	(2,90)	3,98
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

**TABEL 5. LAJU PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT Y-ON-Y (PERSEN)
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017**

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5,84	5,73	4,55	3,07	3,45
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	5,92	4,94	5,34	4,94	2,66
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	3,13	4,34	3,58	3,75	3,08
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	4,67	5,03	4,58	1,55	4,14
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,83	3,61	4,17	3,49	3,38
e. Transportasi dan Komunikasi	7,67	7,70	2,05	(0,04)	4,49
f. Restoran dan Hotel	6,56	7,09	6,33	3,55	3,18
g. Lainnya	4,29	5,88	8,00	4,89	3,77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,24	6,56	6,06	3,47	3,94
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,82	8,38	7,11	5,48	2,31
a. Konsumsi Kolektif	6,40	8,73	7,06	5,71	2,66
b. Konsumsi Individu	7,50	7,80	7,21	5,10	1,75
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,08	7,83	4,79	2,25	1,91
a. Bangunan	2,30	8,56	4,33	1,53	1,76
b. Mesin dan Perlengkapan	3,87	6,85	4,96	3,57	1,61
c. Kendaraan	2,08	0,80	5,71	6,86	3,25
d. Peralatan Lainnya	3,87	8,07	9,33	3,38	2,93
e. CBR	9,61	5,80	7,90	4,38	2,21
f. Produk Kekayaan Intelektual	7,41	6,39	4,17	4,15	4,59
5. Perubahan Inventori	23,00	(5,92)	(5,10)	(6,79)	26,99
6. Ekspor Barang dan Jasa	3,47	8,37	(0,38)	(1,19)	6,96
a. Barang	2,67	7,89	(1,70)	(1,93)	7,65
a.1. Barang Nonmigas	1,12	8,15	5,41	1,02	6,22
a.2. Barang migas	14,21	7,65	(36,82)	(25,98)	18,41
b. Jasa	10,77	12,08	9,39	2,26	3,25
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	7,58	7,11	(1,01)	(2,72)	6,05
a. Barang	6,65	5,66	(3,70)	(3,39)	6,98
a.1. Barang Nonmigas	4,90	5,33	6,54	0,98	4,11
a.2. Barang migas	11,49	7,34	(35,07)	(23,70)	23,62
b. Jasa	13,30	15,69	13,36	0,43	2,88
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	4,97	5,44	3,98	2,48	4,24

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

